

SKRIPSI

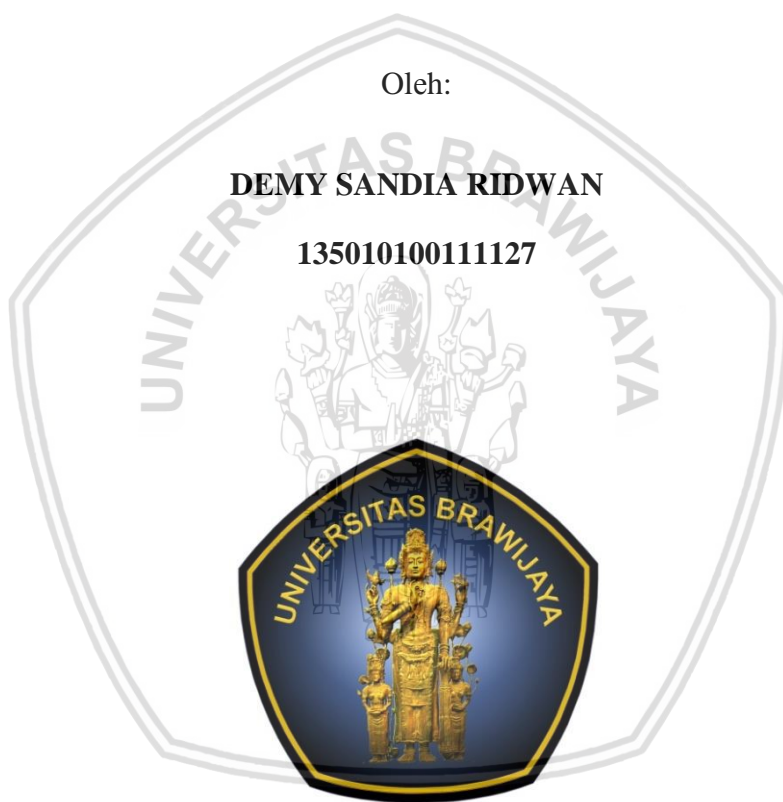
**TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM
KASUS EKSPLOITASI SEKS OLEH ANGGOTA PASUKAN
PEMELIHARA PERDAMAIAN DI KONFLIK BERSENJATA REPUBLIK
AFRIKA TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DEMY SANDIA RIDWAN

135010100111127



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**“TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM
KASUS EKSPLOITASI SEKS OLEH ANGGOTA PASUKAN
PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI KONFLIK BERSENJATA
REPUBLIK AFRIKA TENGAH”**

Oleh:

DEMY SANDIA RIDWAN

135010100111127

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum
NIP. 195903201986011003

Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H.
NIP. 2012088601262001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum
NIP. 197808112002122001

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala anugerah dan rahmat, dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan penelitian skripsi ini. Serta kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia.

Skripsi ini diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKS OLEH ANGGOTA PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN DI KONFLIK BERSENJATA REPUBLIK AFRIKA TENGAH”**.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
2. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
3. Pak Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama, saya ucapkan terima kasih atas doa, bimbingan, dampingan, arahan, kesabaran dan motivasinya. Semoga ilmu yang penulis terima menjadi ilmu yang bermanfaat.

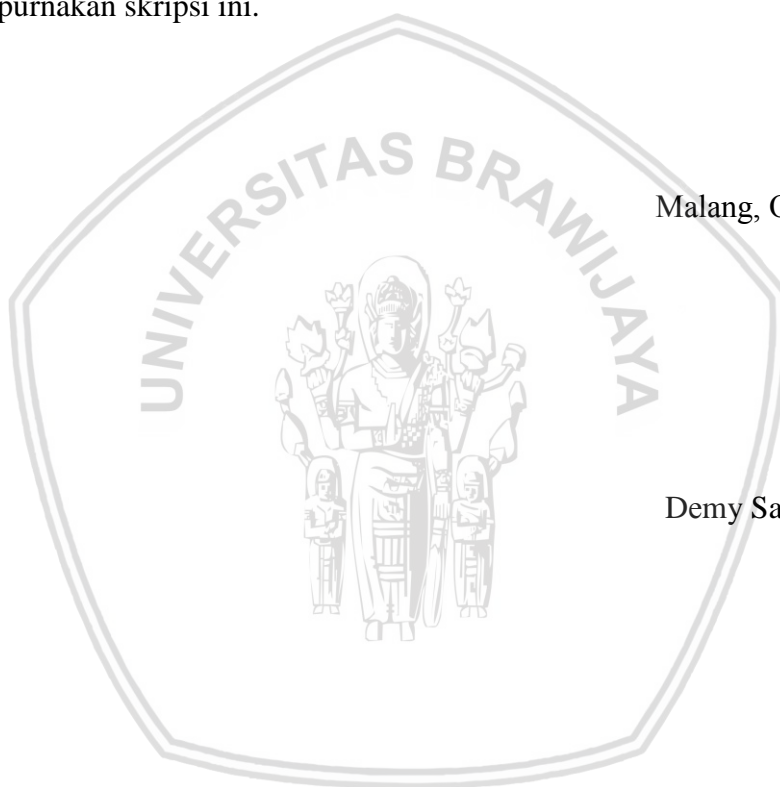
4. Pak Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, saya ucapkan terima kasih atas doa, bimbingan, dampingan, arahan, kesabaran dan motivasinya. Semoga ilmu yang penulis terima menjadi ilmu yang bermanfaat.
5. Keluarga saya, Bapak Imron Sunaryo, Mama Alm. R. Suwarsih, Mba-Mba saya Diar Sandra Sukmawati, Lisa Sulistyowati, dan Effin Chernanda, Mas-Mas saya, Dias Suliandra Fauzi, T. Faizal, dan Abdul Hadi, serta keponakan-keponakan saya, Yundha, Sofi, Fanny, Okta, Hanum, Nayla, Runi, dan Cher. Terima kasih sudah selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat-sahabat saya dari kecil, M.Arief Setiawan dan Hendry Hartono, dan juga abang-abang “Sadewa”, Bang Kiki, Bang Ryan, Bang Uca, Bang Reza, Bang Doni, dan juga Farhan yang sudah banyak menghibur saya
7. Teman-teman seperjuangan “1236 Rolling Crew”, Adit, Aldo, Alvin, Benny, Gilbert, Romario, dan Whina terima kasih sudah menjadi teman baik saya selama merantau di Malang, Sukses untuk kita semua.
8. Kakak-kakak saya di Malang, Ahong, Indri, Saski, Gaga, dan lain-lain, terima kasih sudah membagi ilmunya kepada saya.
9. Adik-adik saya di Malang, Yuke, Sarah, Oci, Dimas, Fiki, dan lain-lain, terima kasih sudah membantu saya.
10. Teman-Teman Kost Mondokaki, Shiddiq, Haykal, Wicak, Eja, Aqli, Dito, Esa dan lain-lain terima kasih sudah banyak membantu saya selama di Malang.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia. Saran dan kritikan untuk penulis sangat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Malang, Oktober 2018

Demy Sandia Ridwan



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
RINGKASAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Tanggung Jawab	10
B. Perserikatan Bangsa-Bangsa	11
C. Pasukan Pemelihara Perdamaian	20
D. Pengertian Eksploitasi Seks	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29

B. Pendekatan Penelitian	29
C. Jenis Bahan Hukum	30
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
F. Definisi Konseptual	31
 BAB IV	33
 PEMBAHASAN DAN HASIL	33
A. Tanggung Jawab PBB Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seks Yang Dilakukan Oleh Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian	33
1. Prinsip Tanggung Jawab PBB Atas Pelanggaran Hukum Oleh Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian.....	33
2. Jenis Tanggung Jawab PBB Atas Pelanggaran Hukum Oleh Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian.....	40
3. Pertanggungjawaban PBB Dalam Kasus Eksploitasi Seks Oleh Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian	44
B. Sanksi Yang Bisa Diberikan Kepada Pasukan Pemelihara Perdamaian Atas Kasus Eksploitasi Seks	53
1. Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB.....	53
2. Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Pasukan Pemelihara Perdamaian.....	66
 BAB V.....	71
 PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

DEMY SANDIA RIDWAN, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Oktober 2018, **TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKS OLEH ANGGOTA PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN DI KONFLIK BERSENJATA AFRIKA TENGAH**, Dr.Setyo Widagdo S.H., M.Hum., Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H

Kata Kunci: PBB, Tanggung Jawab, Pasukan Pemelihara Perdamaian, Eksploitasi Seks.

PBB adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, demi menciptakan perdamaian dan keamanan internasional PBB melalui Dewan Keamanannya membuat sebuah resolusi untuk membuat sebuah operasi perdamaian jika terjadinya sengketa atau konflik suatu negara. Salah satu operasi perdamaian PBB yang ada sekarang adalah MINUSCA, operasi perdamaian ini beroperasi di konflik bersenjata Republik Afrika Tengah. Namun beberapa pasukan pemelihara perdamaian yang tergabung didalam MINUSCA ini melakukan tindakan eksploitasi seks kepada warga sekitar. Hal ini merupakan pelanggaran norma, kode etik PBB dan hukum hak asasi manusia.

Dalam skripsi ini penulis ingin menganalisa mengenai tanggung jawab PBB yang merupakan penyelenggara operasi perdamaian dalam menangani kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh anggota pasukan pemelihara perdamaian. Selain itu penulis juga ingin menganalisa sanksi apa yang bisa diberikan kepada anggota pasukan pemelihara perdamaian atas kasus eksploitasi seks tersebut. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PBB dapat dimintai tanggung jawab atas kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh anggota pasukan pemelihara perdamaian berupa permintaan maaf dan juga ganti rugi atau kompensasi. Selain itu pasukan pemelihara perdamaian yang terbukti melakukan eksploitasi seks juga dapat diberikan sanksi pidana dan perdata oleh Negara pengirimnya.

SUMMARY

DEMY SANDIA RIDWAN, *International Law, Faculty of Law, Brawijaya University, October 2018*, **RESPONSIBILITY OF UNITED NATIONS OVER SEXUAL EXPLOITATION BY UN PEACEKEEPING TROOPS IN ARMED CONFLICT TAKING PLACE IN THE REPUBLIC OF CENTRAL AFRICA**, Dr.Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H

Keywords: United Nations, Responsibility, Peacekeepers, Peacekeeping Force, Sexual Exploitation

The United Nations is an international organization that has the purpose of maintaining international peace and security, in order to create international peace and security. The United Nations through its Security Council makes a resolution to make a peace operation in the event of a dispute or conflict of a country. One of the current UN peace operations is MINUSCA, this peace operation operates in armed conflict with the Central African Republic. However, some peacekeeping forces who are members of MINUSCA carry out acts of sexual exploitation to the local people. This is a violation of UN norms, codes of ethics and human rights law.

In this thesis, the author would like to analyze the responsibility of the UN which is the organizer of the peacekeeping operation in dealing with cases of sexual exploitation committed by peacekeepers member. In addition, the author also wants to analyze what sanctions can be given to peacekeeping forces on cases of sexual exploitation. The author uses normative juridical methods with the approach of statutory law and case approach.

Based on the results, it can be concluded that the United Nations can be held liable in a case of sexual exploitation committed by peacekeepers member in the form of an apology and compensation or redress. In addition, peacekeepers convicted of sexual exploitation can also be assigned to criminal and civil penalties by the sending country.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya beragam sengketa dalam tatanan dunia memunculkan sebuah pemikiran bahwa perlunya sebuah badan yang bertindak untuk mencegah dan maupun menghentikan sengketa. Kesadaran ini menumbuhkan keinginan masyarakat dunia untuk membangun kembali kerjasama internasional dan upaya-upaya penyelesaian sengketa serta permasalahan-permasalahan internasional lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi atau forum Internasional memiliki tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang sesuai dengan Piagam PBB.¹ Dalam upaya penciptaan perdamaian, Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai badan utama untuk menjaga dan menstabilkan keamanan dan perdamaian internasional. Dewan Keamanan pada umumnya bertindak terhadap dua sengketa yaitu:²

1. Sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan nasional.
2. Kasus-kasus yang mengancam perdamaian atau melanggar perdamaian, atau tindakan-tindakan agresi.

Jika sengketa muncul, DK PBB diberikan kewenangan untuk mengeluarkan resolusi baik berupa seruan gencatan senjata maupun pembentukan pasukan perdamaian.

¹ Boer Mauna, **Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global**, Bandung: PT.Alumni, 2003, hal 648.

² J.G. Starke, **Introduction to International Law, Tenth Edition**, Butterworth, London, 1989, hal 517

Operasi pemeliharaan perdamaian PBB / *United Nations Peacekeeping Operations* (UN PKO) diperkenalkan oleh Mantan Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold pada tahun 1950-an dan merupakan istilah yang dipakai untuk segala macam kegiatan operasional untuk membantu pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian yang berkembang dan berada di bawah wewenang DK PBB. Sesuai dengan pasal 43 Piagam PBB menyatakan bahwa³:

“All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.”

Kesepakatan bersama masyarakat dunia mengakui perang terbuka harus diakhiri. Permusuhan antara pihak yang bertikai mesti diselesaikan di meja perundingan. Kalaupun masih terjadi peperangan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dengan melibatkan anggota PBB, dimana Indonesia termasuk didalamnya, agar memberi ruang pada upaya bina damai selanjutnya. Dalam melakukan misi perdamaian, PBB melibatkan sejumlah *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya tentara yang direkrut dari tiap-tiap negara anggota PBB yang menyediakan diri sebagai kontributor.

Sejak diperkenalkan oleh Mantan Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold, peran UN PKO dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia terus meningkat dari waktu ke waktu. Misi UN Peacekeeping pada masa sebelum

³ United Nations, *Charter of the United Nations: Chapter VII*, <http://www.un.org/en/sections/uncharter/chapter-vii/index.html> diakses 07 Januari 2018

Perang Dingin tidak lebih dari 5 misi sedangkan saat ini terdapat 15 misi *UN Peacekeeping* di 4 benua seluruh dunia.⁴

Jumlah pasukan penjaga perdamaian, dikenal dengan “*blue helmets*”, terdiri dari *uniformed personnel* yang meningkat drastis dari 30 personil pada tahun 1950-an hingga mencapai 106,706 personil di tahun 2017 yang berasal 125 dari 192 negara anggota PBB yang bersedia menyumbangkan pasukan perdamaian dikenal sebagai *Troop Contributing Countries* (TCC).⁵

Istilah pasukan pemelihara perdamaian (*peace keeping force*) sebenarnya tidak tercantum secara eksplisit dalam Piagam PBB. Istilah ini menurut sejarah lahir dari resolusi Majelis Umum PBB (988-ES-I) 4 Nopember 1956 yang meminta Sekretaris Jendral untuk segera membentuk Pasukan Internasional Darurat dengan tugas menghentikan pertikaian antara Israel dan Mesir. Resolusi ini lahir sebagai reaksi dari invasi Israel ke wilayah Mesir sebagai akibat nasionalisasi terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956, hingga lahirlah UNEF (*United Nations Emergency Force*). Beberapa tahun kemudian setelah pembentukan UNEF tepatnya tahun 1960, dibentuk juga ONUC (*Op ration des Nations Unies au Congo*) oleh Dewan Keamanan PBB.⁶

Pasukan pemelihara perdamaian PBB memperoleh hadiah Nobel Perdamaian pada tanggal 29 September 1988. Pemberian hadiah Nobel tersebut didasari atas keberhasilan dan dedikasi pasukan pemelihara perdamaian dalam

⁴ United Nations Peacekeeping, *Peacekeeping Operations: Current Operations*, <https://peacekeeping.un.org/en>. Diakses 7 Januari 2018

⁵ United Nations Peacekeeping, *Data United Nations Peacekeeping*, <https://peacekeeping.un.org/en/data-0>. Diakses 7 Januari 2018

⁶ Robert C.R. Siekmann, *National Contingents in United Nations Peacekeeping Forces*, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, hal 4

melaksanakan misi yang berbahaya dan yang menuntut keterampilan khusus demi tercapainya perdamaian.⁷

Namun disamping segala prestasi yang telah dicapai, pasukan pemelihara perdamaian PBB juga memiliki beberapa kasus kemanusiaan yang terjadi selama masa tugasnya. Misalnya yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, Mozambik, Eritrea, dan Somalia, penyalahgunaan anak dibawah umur terjadi. Dan laporan dari Mozambik yang diliris Agustus 1996, salah satu yang pertama muncul isu eksploitasi seksual terhadap anak-anak oleh pasukan pemelihara perdamaian. Pada tahun 2001, informasi resmi dari PBB soal pelecehan seksual juga terjadi terhadap pengungsi di Guinea, Liberia dan Sierra Leone.⁸

Dan yang terbaru eksploitasi seks yang dilakukan beberapa oknum pasukan pemelihara perdamaian di Republik Afrika Tengah yang berasal dari Republik Demokratik Kongo. Pada awalnya terdapat dugaan terhadap pasukan pemelihara perdamaian PBB yang berada di Republik Africa Tengah (MINUSCA) melakukan tindakan eksploitasi seks terhadap warga sipil yaitu anak-anak. Insiden eksploitasi seks ini terjadi pada bulan Desember 2013 dan Juni 2014. Pertama diketahui pada saat staf UNICEF lokal bersama staf kantor hak asasi manusia (*Human Rights Officer*) yang bekerja untuk misi PBB di Republik Afrika Tengah yang berada disana melakukan wawancara terhadap beberapa anak di wilayah tersebut.

⁷ Departemen of Public Information, *United Nations Security Council*, New York, 1989, hal 18

⁸ Tirto, **Jejak Suram Kejahatan Seksual Pasukan Penjaga Perdamaian**, <https://tirto.id/jejak-suram-kejahatan-seksual-pasukan-penjaga-perdamaian-ctX8>. Diakses 7 Januari 2018

Pada musim semi 2014 terungkap bahwa pasukan pemelihara perdamaian yang bertugas disana dilaporkan telah melakukan eksploitasi seks terhadap sejumlah anak-anak dalam pertukaran untuk makanan atau uang. Pelaku diduga sebagian besar dari kekuatan militer Perancis yang dikenal sebagai Angkatan Sengaris yang beroperasi sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB. Pasukan ini diduga melakukan eksploitasi seks terhadap anak laki-laki di camp M’Poko untuk pengungsi internal di kota Bangui pada Desember 2013 sampai Juni 2014. Sebagai gantinya anak-anak menerima sejumlah makanan atau uang tunai dari para prajurit.

Tahun 2017, tercatat 3 kasus eksploitasi seks dan 9 kasus lainnya dilaporkan pada tahun 2016. Menanggapi reaksi keras dari PBB, pemerintah Republik Demokratik Kongo memutuskan menarik seluruh 630 prajurit yang tergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian di Afrika Tengah. Namun PBB tetap mempertahankan unit polisi Republik Demokratik Kongo dibawah bendera pasukan pemelihara perdamaian dengan alasan para polisi tersebut memperlihatkan kinerja yang baik dan tidak berkelakuan seperti militernya⁹ Laporan PBB menunjukkan sedikitnya ada 106 orang wanita mengaku pernah mendapat kekerasan dari pasukan pemelihara perdamaian PBB. Para tentara memaksa wanita di sekitar *camp* melayani mereka. Setelah itu membayar para wanita itu dengan uang receh di bawah USD 1 atau Rp 13.000.

⁹ Merdeka, **Kasus Pemerkosaan dan Eksploitasi Seks, Kongo Tarik Pasukan dari PBB**, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pemerkosaan-eksploitasi-seks-kongo-tarik-pasukan-dari-pbb.html>. diakses 7 Januari 2018

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Asal Instansi, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Girindra Wardhana (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 2018	PERTANGGUNG JAWABAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) KEPADA KORBAN KONFLIK BERSENJATA DALAM HAL KEGAGALAN KEGIATAN PEACE KEEPING (STUDI KASUS SREBRENICA 1995)	Membahas meengenai tanggung jawab PBB	Membahas mengenai kegagalan peacekeeping dalam menjalankan tugasnya

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKS OLEH ANGGOTA PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN DI KONFLIK BERSENJATA REPUBLIK AFRIKA TENGAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, beberapa permasalahan pokok yang akan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab PBB dalam menangani kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh anggota pasukan pemeliharaan perdamaian?
2. Apa sanksi yang bisa diberikan kepada anggota pasukan pemeliharaan perdamaian atas kasus eksploitasi seks tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab PBB dalam menangani kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh anggota pasukan pemeliharaan perdamaian.
2. Untuk menganalisis sanksi apa yang bisa diberikan kepada anggota pasukan pemeliharaan perdamaian atas kasus eksploitasi seks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum internasional khususnya dalam bidang peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis dalam perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

- 1) Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan sebagai metode pembelajaran dalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang hendak menyelesaikan tugas akhir.
- 2) Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulis yang merupakan wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
- 3) Penelitian ini berguna untuk menambah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Internasional.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKS OLEH ANGGOTA PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAAN DI KONFLIK BERSENJATA REPUBLIK AFRIKA TENGAH”** berisikan lima bab yang berhubungan satu sama lain yang disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, agar dapat mengetahui apa yang akan dicapai pada penelitian serta bagaimana sistematika skripsi untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan memuat teori-teori yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian dan data kepustakaan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat, yaitu: tentang bagaimanakah Tanggungjawab PBB dalam menangani kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh anggota pasukan pemeliharaan perdamaian ditinjau dari *Draft Article on the Responsibility of International Organization* dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2272 tahun 2016 serta apa sanksi yang bisa diberikan kepada pasukan pemeliharaan perdamaian atas kasus eksploitasi seks tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari Penulis berdasarkan penelitian dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atas perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.

Ada dua istilah yang merujuk pada istilah tanggung jawab dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut Mr. Kearney (*the America member*), istilah *responsibility* digunakan hanya dalam hal yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kemudian *liability* adalah istilah yang lebih tepat digunakan ketika perbuatan yang dilakukan itu sah namun ada kerugian yang timbul dari pelaksanaan suatu perbuatan tersebut.¹⁰

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*)

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang umum dalam hukum pidana maupun perdata. Perbuatan melawan hukum mewajibkan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita

¹⁰ Julio Barboza, *The Environment, Risk, and Liability in International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston, 2011, hal. 22-30

d. Adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan yang dimaksud ialah unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, yang dimaksud hukum disini tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tapi kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dan akibatnya. Tidak ada hubungan antara keadaan kejiwaan pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*presumption of liability*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga ini memiliki pandangan yang unik, dimana dalam teori ini beban pembuktian beralih dari penggugat terhadap pihak tergugat. Tergugat memiliki tanggung jawab atas kerugian yang timbul, tetapi tidak apabila ia sanggup memberi bukti bahwa pihaknya telah melakukan semua tindakan untuk menghindari kerugian tersebut atau bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat dihindarkan.

B. Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di

dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional.¹¹ Oleh sebab itu sebagai salah satu fungsi daripada PBB adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional yang terjadi. Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Piagam PBB:

“We the peoples of the united nations determined to save succeeding generations from the scourge of war...”

Yang berarti PBB bertujuan menyelamatkan generasi-generasi penerus dari ancaman terhadap perang.

Oleh sebab itu PBB berperan aktif di dalam menyelesaikan setiap sengketa-sengketa yang terjadi diantara negara-negara di dunia. Salah satu prinsip yang dipegang PBB di dalam menyelesaikan setiap sengketa yang ditangani seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB:

“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered”

2. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri seperti yang tercantum dalam *Preamble* yaitu:¹²

- a. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang;
- b. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil;

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, **Organisasi Internasional**, Jakarta, UI-Press, 1987, hal. 1

¹² Sugeng Istanto, **Hukum Internasional**, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hal.129-130

- c. Menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional yang lain;
- d. Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Adapun tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam ialah:¹³

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan;
- b. Mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa;
- c. Mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar manusia;
- d. Menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut.

Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa membaginya dalam 6 organ utama yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.

3. Resolusi Dewan Kemanan PBB

3.1 Resolusi Dewan Keamanan PBB Secara Umum

¹³ *Ibid*

Pada umumnya Resolusi merupakan sesuatu pernyataan tertulis yang berisi kesepakatan oleh negara-negara anggota PBB. Kesepakatan antar-negara dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian yang mengikat antar-negara tersebut. Resolusi merupakan tatanan sumber hukum baru menurut kebiasaan internasional yang diakui oleh negara-negara didunia. Keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif suatu organisasi internasional.¹⁴

Resolusi dalam hal ini sebagai mana yang digunakan oleh PBB memiliki arti luas yaitu tidak hanya mencakup suatu rekomendasi namun juga mencakup suatu keputusan. Resolusi yang dilahirkan oleh suatu organisasi internasional ada yang hanya berlaku dan megikat pada ruang lingkup organisasi yang bersangkutan saja tetapi ada pula yang tidak hanya berlaku dan mengikat pada ruang lingkup organisasi yang bersangkutan melainkan berlaku dan mengikat bagi negara-negara yang bukan anggota.¹⁵ Maka dari itu resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB sangat berpengaruh secara besar dan luas.

Adapun fungsi-fungsi resolusi yang dikeluarkan oleh suatu Organisasi Internasional:¹⁶

- a. Menciptakan kewajiban, hak, kekuatan, dan wewenang (fungsi substantif).

¹⁴ J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, Cambridge : Cambridge U.P. 1995, hal 105.

¹⁵ Sri Setianingsih Suwardi, *Inti Sari Hukum Internasional Publik*, Alumni, Bandung, 1986, hal 45

¹⁶ Marko Divac Oberg, *The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ*, Eur.J.Int'l.L, 2006, hal 881

- b. Menentukan fakta atau keadaan hukum yang dapat menentukan fungsi substantif.
- c. Menentukan bagaimana dan kapan suatu fungsi substantif dapat berlaku.

Dewan Keamanan PBB mempunyai tugas utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan dunia dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB yang terdapat dalam pasal 24 Piagam PBB, maka semua anggota PBB sepakat untuk memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab yang utama tersebut (*Primary Responsibility*).¹⁷ Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya terdapat di dalam bab VI, VII, VIII, dan XII Piagam PBB.

Pasal yang mengatur tentang Dewan Keamanan yaitu bab V Pasal 23-32, bab VI Pasal 33-38, bab VII Pasal 39-51, bab VIII Pasal 52-54, dan Pasal 76 serta bab XII Pasal 82-84. Ketentuan-ketentuan lain dapat ditemukan di dalam Pasal 1, 2, 4-7, 10-12, 15, 18, 20, 65, 93, 94, 96-99, 106, dan 109 Piagam.

Fungsi berdasarkan bab VI adalah mengadakan penyelidikan atas sengketa dan menentukan apakah suatu kondisi akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Fungsi Dewan Keamanan salah satunya untuk memberikan rekomendasi kepada para pihak dengan tujuan

¹⁷ Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Piagam PBB

untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Rekomendasi terdiri dari 3 bagian yaitu:¹⁸

- a. Rekomendasi yang berisi syarat-syarat penyelesaian sengketa tertentu. (Pasal 36 Piagam PBB).
- b. Rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
- c. Rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan atau menurut ketentuan yang berlaku di organisasi regional. (Bab VII Piagam PBB).

3.2 Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Hukum Internasional

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian dari Resolusi adalah suatu bentuk pernyataan yang resmi mengenai suatu pendapat atau kehendak dari suatu badan yang resmi atau suatu majelis yang bersifat umum serta disahkan melalui pemungutan suara serta dinyatakan bahwa suatu resolusi ini merupakan sebagai bentuk penyelesaian secara legislatif.¹⁹

Pada umumnya resolusi merupakan suatu pernyataan tercatat yang berisi kesepakatan oleh negara-negara anggota.²⁰ Kesepakatan-kesepakatan antar-negara tersebut mereka tuangkan dalam bentuk suatu perjanjian mengikat antar negara tersebut. Keputusan-keputusan atau resolusi yang dilahirkan oleh suatu organisasi internasional ada yang mengikat pada ruang lingkup internal organisasinya saja. Namun ada juga keputusan yang

¹⁸ J.G. Merrills, *Op Cit*

¹⁹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, hal 457

²⁰ Marko Divac Oberg, *Op.Cit*, 2006, hal 879

dikeluarkannya tidak hanya berlaku dan mengikat bagi negara anggotanya saja melainkan juga mengikat bagi negara-negara non-anggota.

Oleh karena itu pengaruh dan ruang lingkup berlakunya keputusan tersebut sangat besar dan luas. Hal ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB dimana ruang lingkup resolusi yang dikeluarkannya juga berlaku bagi negara non-anggota PBB.²¹

Kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat pada Pasal 25 Piagam PBB yaitu:

“The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter”.

Yang berarti bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan serta pada pasal itu pula, Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat termasuk keputusan tersebut adalah resolusi Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, parapihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.²²

Dalam proses pengamilan keputusan yang berupa resolusi harus memenuhi syarat sesuai pasal 27 Piagam PBB agar sah dan memiliki

²¹ Boer Mauna, *Op.Cit*, hal 465

²² Sri Setianingsih Suwardi, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hal 137

kekuatan mengikat secara hukum. Dalam pasal 27 disebutkan suatu resolusi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian suatu sengketa internasional sebagai hasil dari sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sah apabila telah disetujui oleh suara 9 negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada veto dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut.

Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, semua keputusan Dewan Keamanan dalam hal menyelesaikan sengketa internasional memerlukan suara yang menyatakan anggota Dewan Keamanan PBB termasuk kedaulatan suara dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena termasuk dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural. Karena itu masih dimungkinkan adanya veto dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena dalam masalah yang bukan prosedural harus adanya persetujuan dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Jadi adanya veto dari anggota tetap dapat mencegah adopsi atau disetujuinya suatu proposal sekalipun hal itu telah memenuhi jumlah suara yang mendukung. Jika salah satu dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan veto maka membuat suatu resolusi tersebut tidak diberlakukan dan tidak punya kekuatan mengikat secara hukum.²³

Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (6) yaitu:

²³ Sri Setianingsih Suwardi, **Pengantar Hukum Organisasi Internasional**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hal 165

*“the organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security”.*²⁴

Berdasarkan pasal tersebut, suatu negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut sidang Dewan Keamanan PBB negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Jika suatu negara tidak menaati suatu resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maka Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi baik secara militer maupun non-militer. Hal itu diatur dalam pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Pasal 41 Piagam PBB yaitu :

*“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations”.*²⁵

Yang dimaksud adalah diaturnya tentang tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer, tindakan tersebut meliputi tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan darat, laut, udara, pos, dan telegrap, radio, juga alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Apabila usaha

²⁴ *Ibid*, hal 19

²⁵ Pasal 41 Piagam PBB

yang didasarkan pada pasal 41 Piagam PBB tidak berhasil maka akan diambil tindakan berdasarkan pasal 42 Piagam PBB yaitu :

*“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may tak such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations”.*²⁶

Dalam Pasal 42 diartikan bahwa bila usaha yang didasarkan pasal 41 tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut dan darat yang mungkin diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini bertujuan untuk menunjukan *power of enforcement* dari Dewan Keamanan kepada negara yang terlibat sengketa internasional untuk menaati resolusi Dewan Keamanan PBB demi terjaganya keamanan dan perdamaian internasional.

C. Pasukan Pemelihara Perdamaian

1. Sejarah Pasukan Pemelihara Perdamaian

Gagalnya sistem kolektif bersama seperti yang diinginkan Piagam PBB telah mengharuskan PBB memikirkan cara-cara baru dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ingin menghindar dari pengalaman Liga Bangsa Bangsa yang gagal mencegah terjadinya Perang Dunia II, Terbentuknya Pasukan Penjaga Perdamaian merupakan improvisasi dalam menghadapi krisis yang di sebabkan interaksi militer dari dua anggota

²⁶ Pasal 42 Piagam PBB

tetap DK PBB yaitu Inggris dan Perancis di Terusan Suez dan keadaan luar biasa yang mengelilingi peristiwa tersebut.²⁷

Tokoh utama pembentukan Pasukan PBB adalah Sekjen PBB tahun 1953 Dag Hammarskjold dan keberhasilannya telah mendapatkan penghargaan tinggi masyarakat internasional. Kegiatan pasukan tersebut dinamakan “Operasi Pemeliharaan Perdamaian”. Istilah yang selanjutnya dipakai untuk segala macam kegiatan operasional PBB untuk perdamaian dengan sistem yang selalu berkembang sesuai perkembangan keadaan yang secara praktis menggantikan sistem keamanan bersama piagam. Mengingat hingga hari ini belum adanya *consensus* internasional mengenai definisi operasi Pemeliharaan Perdamaian yang dikemukakan oleh sekjen PBB, Boutros Boutros-Ghali, telah diterima secara umum yaitu²⁸ :

“Penggelaran suatu kehadiran PBB disuatu wilayah yang hingga saat ini masih dengan persetujuan pihak terkait, biasanya meliputi personel militer dan atau polisi PBB serta kadang kadang juga meliputi personil sipil. Operasi pemeliharaan perdamaian merupakan suatu teknik yang memperluas kemungkinan bagi pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian”

Sistem keamanan bersama yang dirancang Piagam PBB dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang merupakan tulang punggung sistem keamanan PBB ternyata menjadi tidak berarti sesudah Perang Dunia II langsung ditandai dengan tidak kondusif atau perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet (Russia). Sebab dari pada itu pembentukan pasukan bersenjata yang merupakan

²⁷ Boer Mauna, **Hukum Internasional pengertian, peranan dan Fungsi dalam era dinamika global**, PT Alumni Bandung 2005, hlm, 598-602

²⁸ *Ibid*, hal 599

instrument militer tidak dapat terlaksana karena tidak adanya kesepakatan antara kedua negara tersebut sebagai anggota tetap DK PBB. Konsekuensi dari pada itu ketentuan khusus yang tercantum dalam pasal 43 Piagam PBB mengenai cara dan modalitas pembentukan dan penyediaan pasukan bersenjata dari setiap negara anggota DK PBB tidak berjalan. Dalam mengatasi keadaan tersebut atas prakarsa Amerika Serikat, Majelis Umum PBB pada tanggal 3 november 1950 menerima resolusi yang dikenal dengan nama *Uniting for Peace Resolution* (Resolusi No. 337 V)²⁹, yang dikenal dengan nama Resolusi Dean Acheson yang memberikan wewenang kepada Majelis Umum untuk bertindak bila DK PBB menjadi lumpuh karena penggunaan hak veto. Ketentuan sentral resolusi tersebut memungkinkan Majelis Umum untuk membahas semua keadaan dimana terjadi ancaman terhadap perdamaian atau suatu agresi dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang sesuai mengenai tindakan-tindakan kolektif termasuk penggunaan senjata bila diperlukan sekiranya DK PBB tidak dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Demikianlah pasukan internasional dibentuk secara definitif pada tanggal 7 November 1956 melalui resolusi (100-ES-I) yang mengatur prinsip-prinsip pokok organisasi dan cara kerja pasukan internasional. Sejak diluncurkannya hingga saat ini, operasi penjaga perdamaian PBB telah mengalami perubahan karakteristik yang signifikan. Garis besarnya, perubahan tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu pada masa Perang Dingin dan masa pasca Perang Dingin. Pada masa perang dingin penggelaran operasi PBB masih terikat dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hubungan

²⁹*Ibid*, hal 587

internasional pada waktu itu hanya melaksanakan tugas tugas militer, dan secara tidak resmi dikenal sebagai operasi penjaga perdamaian tradisional atau generasi pertama.

Pasca Perang Dingin, dengan berakhirnya ketegangan Timur-Barat dan munculnya tantangan-tantangan baru terhadap perdamaian dan keamanan yang lebih banyak berbentuk konflik internal di berbagai wilayah, operasi penjaga perdamaian mulai terlibat pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh konflik internal suatu negara. Dengan cakupan yang lebih luas, operasi penjaga perdamaian tersebut dinamakan operasi penjaga perdamaian multidimensi atau generasi kedua. Pada pasca Perang Dingin dewasa ini, operasi-operasi Penjaga Perdamaian PBB sering pula digelar untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik dengan menggunakan kekuatan militer guna menciptakan perdamaian. Karakteristik operasi pemelihara perdamaian yang memaksa terciptanya perdamaian melalui kekuatan militer dinamakan operasi penjaga perdamaian dengan kekuatan militer atau generasi ketiga.

2. Pengertian Pasukan Pemelihara Perdamaian

Istilah pasukan pemelihara perdamaian (*peace keeping force*) sebenarnya tidak tercantum secara eksplisit dalam Piagam PBB. Istilah ini menurut sejarah lahir dari resolusi Majelis Umum PBB (988-ES-I) 4 Nopember 1956 yang meminta Sekretaris Jendral untuk segera membentuk Pasukan Internasional Darurat dengan tugas menghentikan pertikaian antara Israel dan Mesir. Resolusi ini lahir sebagai reaksi dari invasi Israel ke wilayah Mesir sebagai akibat nasionalisasi terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956, hingga lahirlah

UNEF (United Nations Emergency Force). Beberapa tahun kemudian setelah pembentukan UNEF tepatnya tahun 1960, dibentuk juga ONUC (Opération des Nations Unies au Congo) oleh Dewan Keamanan PBB.³⁰

3. Tujuan atau Agenda Pasukan Pemelihara Perdamaian

Dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pasukan pemelihara perdamaian mempunyai 4 (empat) agenda, secara umum 4 (empat) agenda tersebut adalah³¹ :

a. *Preventive Diplomacy*

Preventive Diplomacy adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi regional bekerja sama dengan PBB.

b. *Peace Making*

Peace Making adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Di antara dua tugas ini terdapat kewajiban untuk mencoba membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan dengan cara-cara damai.

³⁰ Robert C.R. Siekmann, *National Contingents in United Nations Peacekeeping Forces*, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, hal 4

³¹ Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace*, New York: United Nations, 1992, hlm 12 dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal 95-97

c. *Peace Keeping*

Peace Keeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam memelihara perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan juga personel sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata (angkatan perang)

d. *Peace Building*

Peace Building adalah tindakan mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. *Peace Building* lahir setelah berlangsungnya konflik.

4. *Status of Forces Agreement*

Seiring dengan berjalannya hubungan struktural antara PBB dengan negara anggota, dan para pihak dalam suatu konflik dimana pasukan pemelihara perdamaian ditempatkan telah diformalisasikan dalam berbagai perjanjian. Salah satunya adalah *Status of Forces Agreement* atau SOFA yang mengatur hubungan antara pasukan perdamaian PBB dengan negara penerima. Secara umum tujuan dibuatnya suatu SOFA diantaranya adalah agar negara penerima menyediakan bantuan berkelanjutan terhadap operasi PBB dengan cara memberikan kebebasan bergerak serta fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugasnya. Perjanjian ini juga biasanya

memuat pengaturan mengenai pemberian hak-hak istimewa dan imunitas dari tuntutan hukum bagi anggota pasukan perdamaian PBB.³²

SOFA dinegosiasikan kasus perkasus sesuai dengan kebutuhan PBB dan negara penerima untuk operasi yang akan dikirim saat itu. Oleh karena itu yang diatur dalam SOFA dari tiap operasi pun berbeda-beda. Akan tetapi, PBB telah membuat suatu model SOFA yang memuat hal-hal yang biasanya butuh diatur dalam SOFA.³³ Model SOFA ini dijadikan rujukan dalam proses negosiasi dengan negara penerima. Model SOFA akan berlaku sampai SOFA yang spesifik mengatur tentang operasi perdamaian tertentu dibuat dengan negara penerima.

Adapun keewajiban yang mengikat pasukan perdamaian PBB menurut Model SOFA adalah:

- a. Menghindari segala tindakan yang dapat merusak kenetralan maupun karakteristik internasional PBB (Pasal 6)
- b. Menghormati Hukum dan peraturan lokal di daerah misi (Pasal 6)
- c. Mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin kedisiplinan dan keteraturan diantara anggota misi termasuk staf lokal, melalui special representative of the secretary general yang memimpin misi tersebut (Pasal 40)
- d. Bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mengadakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang menjadi kepentingan kedua

³² Hak-hak istimewa dan imunitas yang diatur dalam SOFA merujuk pada pengaturan konvensi tentang hak istimewa dan imunitas PBB tahun 1946. Diatur dengan spesifik dalam pasal 46 model SOFA bahwa anggota misi memiliki imunitas atas segala ucapan dan tindakannya yang termasuk dalam lingkup kapasitasnya sebagai anggota misi PBB (*official capacity*)

³³ United Nations General Assembly, *Model SOFA*, GA Doc. A/45/594, 9 Oktober 1990.

belah pihak, semisal penyelidikan saksi-saksi dan pemberian bukti-bukti (Pasal 44)

- e. Menyelesaikan klaim perdata yang timbul dari tindakan misi dengan cara yang telah ditentukan (Pasal 53).

D. Pengertian Eksploitasi Seks

Berdasarkan kamus hukum, “sex dalam bahasa inggris diartikan sebagai jenis kelamin” yang disini dipahami sebagai persoalan hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.³⁴ Secara umum Umar Sa’abah menunjukkan bahwa seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan), dan subjektif (kesadaran individu dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan; pendayagunaan; pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.

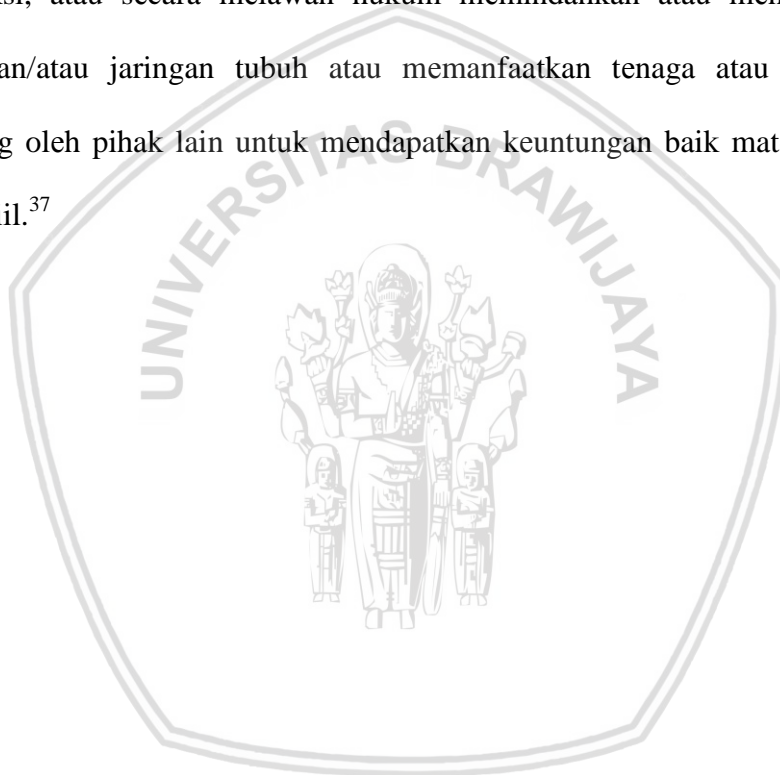
Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan,

³⁴ Abdul Wahid, Muhamad Irfan, **Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 31

³⁵ *Ibid*, hal. 32

penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan.³⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang, eksploitasi seks adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.³⁷



³⁶ Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 24

³⁷ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, hal. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu metodologi adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam setiap penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala tersebut.³⁸

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum tertulis (*statute approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

1) Pendekatan Hukum Tertulis

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari

³⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hal 9

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14

pendekatan hukum tertulis.⁴⁰ Dalam metode pendekatan hukum tertulis peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam hukum tertulis. Penulis akan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum.

2) Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisa pada beberapa kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seks yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian.

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- a. United Nation Charter.
- b. Draft Article on The Responsibility of International Organization 2011
- c. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2272 tahun 2016 tentang kekerasan dan eksploitasi seks dalam operasi penjaga perdamaian.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, notulensi pembahasan perjanjian atau konvensi internasional, dan pendapat para ahli.

⁴⁰ Ibid, hal. 136.

- 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan studi kepustakaan maupun bahan hukum lainnya. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti konvensi atau perjanjian internasional, jurnal hukum, hasil penelitian, buku-buku, tesis, dan lain-lain. Dimana semua itu penulis telusuri pada:

- 1) Perpustakaan
- 2) Buku-buku, Literatur, Jurnal Hukum

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan menguraikan bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan pada konvensi/perjanjian internasional, literatur hukum, hasil penelitian dan lain-lain.

F. Definisi Konseptual

- 1) Tanggung Jawab PBB

PBB dikatakan bertanggung jawab apabila terjadi suatu perbuatan yang dilakukan olehnya dan melahirkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban maupun ketentuan internasional, baik

pelanggaran terhadap perjanjian internasional maupun dari sumber hukum lainnya seperti Resolusi.

2) Eksploitasi Seks

Eksploitasi seks adalah pemanfaatan secara paksa dan seksual oleh pihak lain tanpa persetujuan korban untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil.

3) Pasukan Pemelihara Perdamaian

Pasukan Pemelihara Perdamaian disini adalah beberapa oknum atau pasukan yang dikirimkan oleh negara pengirim kepada PBB untuk melakukan misi pemeliharaan perdamaian di Republik Afrika Tengah.

4) Konflik Bersenjata

Konflik Bersenjata adalah suatu pertempuran saudara bersenjata (*civil war*) antara 2 kelompok pemberontak bernama Seleka yang berisikan komunitas-komunitas Islam dan Anti-Balaka yang berisikan komuntias-komunitas Kristen yang terjadi di Republik Afrika Tengah.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Tanggung Jawab PBB Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seks Yang Dilakukan Oleh Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian

1. Prinsip Tanggung Jawab PBB Atas Pelanggaran Hukum Oleh Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian

Subjek hukum internasional yang pertama adalah negara. Status, kapasitas hukum, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara sudah jelas di lingkup internasional. Negara memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum antar negara atau dengan subjek hukum internasional bukan negara. Namun tidak semua perbuatan suatu negara dapat diterima oleh negara lain maupun subjek hukum internasional lain dan menimbulkan konflik.

Oleh karena itu dikaitkan dengan prinsip dasar negara yaitu kedaulatan dan *equality of states*, bisa diartikan bahwa kedudukan setiap negara itu sama. Sehingga negara yang dirugikan oleh negara lainnya dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang diterimanya. Sehingga *International Law Commission* (ILC) membuat *Articles on State Responsibility* yang membahas mengenai prinsip tanggung jawab yang dibebankan kepada negara atas *wrongful act* yang dilakukan suatu negara. Selain itu adapula prinsip *liability* yang memungkinkan negara yang dirugikan mendapat ganti rugi dari negara yang melakukan *wrongful act* tersebut.

Berbeda dengan organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional yang lebih baru. Jika dibandingkan dengan negara, organisasi

internasional adalah bentukan dari beberapa negara dan memiliki batasan tertentu mengenai kewenangan, hak dan kewajibannya, yang diatur didalam piagam atau anggaran dasar organisasi. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum internasional, organisasi internasional harus memenuhi syarat-syarat *legal personality*.

Kegiatan organisasi internasional hampir sama dengan kegiatan negara meski lingkupnya hanya sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi internasional tersebut dan nantinya bisa mempengaruhi keadaan subjek hukum internasional lainnya. Karena organisasi internasional juga memiliki hak untuk menetapkan dan menjalankan kewajibannya yang dapat berdampak juga pada negara-negara yang bukan anggotanya.⁴¹ Oleh sebab itu ILC beranggapan bahwa perlu dirumuskan suatu ketentuan tentang tanggung jawab organisasi internasional. Dan pada tahun 2011 ILC membuat *Draft Articles on the Responsibility of International Organization*. Artikel ini membahas tentang tanggung jawab organisasi internasional yang diadopsi dari *Articles of State Responsibility*. Seperti halnya negara setiap kegiatan organisasi internasional yang melanggar ketentuan hukum internasional menyebabkan munculnya tanggung jawab internasional oleh organisasi internasional tersebut.

Tanggung jawab organisasi internasional dalam penelitian ini lebih rumit dari tanggung jawab negara karena permasalahan yang diangkat mengenai kegiatan *Peacekeeping* yang merupakan ruang lingkup dari hukum humaniter, berkenaan dengan ketentuan-ketentuan apakah setiap pihak yang terlibat didalam konflik bersenjata tersebut dalam hal ini subjek hukum internasional

⁴¹ ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organization, Article 1

dapat dimintai tanggung jawab atas *wrongful act* yang dilakukan dan diharuskan adanya pembayaran kompensasi terhadap pihak yang dirugikan. Karena tidak hanya pihak-pihak yang berkonflik yang turut serta dalam konflik bersenjata melainkan organisasi internasional seperti PBB juga ikut terlibat dalam konflik bersenjata melalui kegiatan *Peacekeeping* tersebut untuk melakukan tugasnya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan dunia.

PBB secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan operasi militer dapat memberikan pengaruh terhadap individu-individu yang terlibat dalam konflik bersenjata, namun belum berkembangnya mekanisme yang mengatur agar organisasi internasional yang turut serta dalam konflik bersenjata dapat dimintai tanggung jawab atas *wrongful act* yang dilakukannya. Berbeda dengan tanggung jawab negara yang sudah jauh lebih berkembang mekanismenya.⁴²

Contoh kasus mengenai tanggung jawab internasional yang berhubungan dengan PBB adalah kasus *Reparation for Injuries Case*,⁴³ kasus tersebut di ajukan ke ICJ dan dalam *Advisory Opinion*-nya, ICJ memutuskan bahwa PBB

⁴² Amerasinghe, C.F, *Principles of the institutional law of international organizations Second Revised Edition*, Cambridge, Cambridge University Press, Hlm. 384.

⁴³ Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 17 September, seorang mediator PBB bernama Count Folke Bernadotte dan ajudannya Kolonel Serot, terbunuh dalam perjalanan dinas ke Yerusalem. Mereka dibunuh oleh anggota dari kelompok Lehi, yang terkadang disebut dengan “Stern Gang”. Kelompok ini merupakan organisasi radikal zionis yang telah melakukan beberapa serangan terhadap warga Inggris dan Arab. Pembunuhan terhadap Bernadotte ini, telah disepakati oleh ketiga pemimpin kelompok Lehi, yaitu : Yitzhak Shamir, Natan Yelli-Mor, dan Yisrael Eldad, dan direncanakan oleh kepala operasi Lehi di Yerusalem, Yehoshua Zetler. Empat orang yang dipimpin oleh Meshulam Makover, kemudian menyerang kendaraan yang ditumpangi oleh Bernadotte, dan salah satu diantara mereka yaitu Yehoshua Cohen menembak Bernadotte.

selaku organisasi internasional memiliki kewenangan mengajukan klaim atas kerugian yang didapat:

“... the Court is authorized to assume that the damage suffered involves the responsibility of a State, and it is not called upon to express an opinion upon the various ways in which that responsibility might be engaged. Accordingly the question is whether the Organization has capacity to bring a claim against the defendant State to recover reparation in respect of that damage or whether, on the contrary, the defendant State, not being a member, is justified in raising the objection that the Organization lacks the capacity to bring an international claim. On this point, the Court’s opinion is that fifty states, representing the vast majority of the members of the international community, had the power, in conformity with international law, to bring into being an entity possessing objective international personality recognized by them alone, together with capacity to bring international claims..”

Advisory Opinion diatas sudah menjadi dasar putusan pengadilan bahwa negara bisa dimintai tanggung jawab atas kerugian yang didapat oleh suatu organisasi internasional. Begitu pula sebaliknya bahwa organisasi internasional juga bisa bertanggung jawab kepada negara atau subjek hukum internasional lainnya jika terbukti merugikan, di mana kerugian tersebut didapatkan karena adanya pelanggaran organisasi internasional atas kewajiban internasional yang berasal dari ketentuan perjanjian, prinsip-prinsip hukum internasional dan kebiasaan internasional.⁴⁴

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional dapat dimintai tanggung jawab atas kegiatan yang menyebabkan jatuhnya korban yang seharusnya dapat dihindari selama konflik bersenjata karena organisasi internasional terikat dengan ketentuan mengenai hukum humaniter dan

⁴⁴ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organization, Article 3

kebiasaan internasional.⁴⁵ Walaupun belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab organisasi internasional tersebut.

1.1 Personalitas Yuridik (Legal Personality) dan Kapasitas Hukum (Legal Capacity) PBB

Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk-bentuk instrumen pokok akan mempunyai suatu *legal personality* dalam hukum internasional. *Legal personality* ini penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kepentingan untuk melaksanakan fungsi hukum, seperti membuat kontrak, membuat perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitas, dan hak-hak tertentu dalam rangka menjalankan fungsinya. *Legal personality* tersebut diperlukan oleh organisasi internasional ketika menjalin hubungan eksternal dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara non-anggota, maupun organisasi internasional lainnya.⁴⁶

Schemers berpendapat bahwa untuk dapat memiliki personalitas yuridik maka suatu organisasi internasional harus memiliki persyaratan sebagai berikut:⁴⁷

1. Dibentuk oleh suatu perjanjian internasional
2. Memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya
3. Diatur oleh hukum internasional publik

⁴⁵ *Ibid*, Article 2

⁴⁶ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, PT. Ghalla Indonesia, Jakarta, 2003, hal 71

⁴⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2005. hal 475

Personalitas yuridik sendiri terbagi dalam personalitas yuridik intern dan personalitas yuridik internasional. Personalitas yuridik intern suatu organisasi internasional diberikan ketika muncul persoalan hukum antara organisasi tersebut dengan negara tuan rumah, seperti masalah rekrutmen karyawan organisasi, kontrak riset, atau pembelian gedung, mebel, dan perlengkapan kantor. Personalitas ini dikuatkan oleh Pasal 104 Piagam PBB yang secara eksplisit menyebutkan bahwa PBB di negara-negara anggota, menikmati kapasitas yuridik yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Namun kecenderungan solusinya adalah tunduknya kontrak-kontrak yang dibuat kepada hukum setempat walaupun banyak pendapat yang menyarankan agar diatur oleh hukum internasional.

Kemudian personalitas yuridik yang kedua adalah personalitas yuridik internasional. Dasar yang menguatkan adalah pasal 104 Piagam PBB yang sudah disebutkan diatas.⁴⁸

Penjelasan mengenai *legal personality* dapat dijabarkan sebagai berikut, terbentuknya organisasi internasional berasal dari bermacam-macam peristiwa dan kesepakatan negara-negara yang terlibat. Ada organisasi yang terbentuk dari perjanjian kerjasama seperti *charter* atau konvensi, maupun sebuah resolusi dari organisasi utama yang sudah berdiri seperti UNICEF yang terbentuk dari resolusi Majelis Umum PBB. Interpretasi sebuah perjanjian hukum yang dinamis diperlukan karena tuntutan perkembangan hubungan internasional. Perjanjian menjadi sangat penting karena menjadi alat utama dari sebuah organisasi internasional.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 477

Fungsi perjanjian antara lain: (1) mengatur tujuan-tujuan organisasi. (2) memberi spesifikasi negara apa yang dapat bergabung dengan organisasi, (3) mengatur struktur organisasi, (4) membentuk sekretariat organisasi, (5) menjelaskan proses bagaimana konflik dalam hubungan internasional akan diselesaikan, (6) menjelaskan *privilege* dan imunitas apa yang dimiliki organisasi.⁴⁹

Lalu akan muncul pertanyaan apakah organisasi internasional memiliki atribut tertentu? Yang dimaksud dengan atribut adalah kekuatan hukum untuk menggugat atau memberi sanksi kepada subjek hukum lainnya. Atau sebaliknya apakah subjek hukum lain dapat menggugat organisasi internasional atau tidak. Jawabannya ada pada alat utama organisasi internasional tersebut, yakni perjanjian, konvensi, piagam, ataupun resolusi. Jika secara tertulis sudah tersedia aturan terkait maka dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional memiliki atribut tersebut.

Beberapa pengadilan dan ilmuwan menyatakan bahwa sebuah atribut melekat dengan organisasi internasional. Atribut ini diberikan hukum internasional kepada organisasi internasional, terpisah dengan atribut negara anggotanya. Atribut inilah yang disebut *legal personality*.

Dalam *advisory opinion Reparation for Injuries case*, disebutkan bahwa ICJ harus memutuskan apakah PBB mampu menggugat klaim diplomatik kematian representatifnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok radikal zionis terhadap seorang mediator PBB dalam kasus tersebut merupakan penghinaan bagi PBB dan seluruh anggota negaranya.

⁴⁹ Sean D.M, *Principles of International Law*, USA, 2006, Hal 41-42

Piagam PBB tidak menyatakan secara jelas bahwa PBB memiliki kekuatan tersebut. Dewan mahkamah menjelaskan bahwa atribut dari sebuah entitas internasional adalah mutlak.⁵⁰

Piagam PBB menyebutkan bahwa setiap negara anggota wajib memberikan bantuan kepada PBB dan patuh kepada Dewan Keamanan PBB. Selain itu piagam PBB juga memberikan *privilage* dan imunitas bagi PBB dalam setiap negara anggotanya. Maka dari pernyataan piagam PBB tersebut dapat dilihat *international personality* dari PBB. Dengan pertimbangan tersebut, Dewan Mahkamah mengimplikasikan bahwa pengajuan kekuasaan PBB menggugat Israel dalam *Reparation of Injuries Case* adalah legal. PBB dapat menuntut ganti rugi atas kematian representatifnya.

Kemudian dari *legal personality* itu lahirlah *legal responsibility*. Suatu organisasi internasional bertanggung jawab atas perilaku buruk yang dilakukan oleh organnya, atau individual kepercayaannya. Bahkan jika organ atau individual tersebut melakukan tindakan diluar wewenang organisasi (*ultra vires*) tanggung jawab kepada organisasi tersebut tetap ada terkait dekat dengan kegiatan organisasi.⁵¹

2. Jenis Tanggung Jawab PBB Atas Pelanggaran Hukum Oleh Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian

Karena *legal personality* PBB sudah tidak diragukan lagi sebagai organisasi internasional, maka dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan

⁵⁰*Ibid*, Hal 42

⁵¹*Ibid*, Hal 43

kedudukan organisasi internasional yang dapat menuntut tanggung jawab kepada subjek hukum internasional lainnya seperti pada *Advisory Opinion ICJ* dalam *Reparation for Injuries Case*, maka organisasi internasional dapat dimintai atau dikenakan tanggung jawab oleh subjek hukum internasional lainnya, karena organisasi internasional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan subjek hukum lainnya.

Hal ini juga terdapat pada *Draft Articles on the Responsibility of International Organization* (DARIO) pasal 1 yang berisikan “*The present draft articles apply to the international responsibility of an international organization for an internationally wrongful act.*”⁵² yang membuat segala peraturan pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban internasional oleh suatu organisasi internasional, meskipun hanya berbentuk *Draft Article* yang dibuat oleh ILC, namun peraturan ini merupakan hukum kebiasaan sehingga bersifat mengikat bagi organisasi internasional.

Dalam hubungan internasional setiap pelanggaran kepentingan salah satu subjek hukum terhadap yang lainnya menimbulkan tanggung jawab dalam berbagai bentuk. Tanggung jawab internasional pada umumnya dianggap terkait dengan negara sebagai subjek hukum yang lazim.⁵³ Tanggung jawab negara-negara mengenai kewajiban internasional merupakan tanggung jawab hukum.⁵⁴ Tanggung jawab negara muncul karena terdapat pelanggaran

⁵² ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organization , Article 1

⁵³ Browlie, *op.cit.*, Hal. 433

⁵⁴ Oppenheim – Lauterpacht, *International Law.*, Mckay, 1965, Hal. 337

terhadap suatu tanggung jawab internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.⁵⁵

Untuk adanya tanggung jawab negara harus ada syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

- a. Adanya suatu kewajiban internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Sampai saat ini masih belum ada penjelasan secara detil tentang tanggung jawab negara, secara umum yang biasa dinyatakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara baru sampai pada fase menjabarkan syarat-syarat dari pertanggungjawaban suatu negara. Walaupun demikian banyak dari ahli-ahli hukum internasional tersebut sudah setuju bahwa tanggung jawab negara ini merupakan prinsip yang mendasar dari hukum internasional.⁵⁷

Oppenheim-lauterpacht membagi tanggung jawab negara atas tanggung jawab asli dan tanggung jawab pengganti. Tanggung jawab asli adalah tanggung jawab suatu negara sebagai akibat dari tindakan-tindakan pemerintah atau badan-badan yang lebih rendah atau orang perorangan yang bertindak atas

⁵⁵ Andrey Sujatmoko, **Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya**, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal. 28.

⁵⁶ Shaw, *op.cit.*, Hal. 174

⁵⁷ Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Jakarta, CV Rajawali. 1991, Hlm. 174

perintah atau dengan wewenang pemerintahnya. Sementara tanggung jawab pengganti adalah tanggung jawab atas tindakan-tindakan tertentu dari subjeknya, yaitu tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian oleh badan-badan (*agent*) yang melampaui kewenangannya, atau menimbulkan kerugian oleh warganya bahkan oleh orang asing selama mereka berdiam di wilayah negara itu.⁵⁸

Sebagai contoh tanggung jawab asli, misal ada sebuah oknum badan pemerintahan suatu negara yang sedang melakukan suatu pekerjaannya terlibat suatu kasus yang merugikan negara tetangga atau negara lainnya, maka negara yang membawahi oknum badan pemerintahan tersebut yang bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh negara lain. Sedangkan contoh tanggung jawab pengganti misal ada warga negara yang berdomisili dinegara tersebut dan tidak bekerja di pemerintahan suatu negara melakukan tindakan yang merugikan negara lain, maka negaralah yang bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh negara lain.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, yaitu tanggung jawab PBB dalam tindakan eksploitasi seks yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian juga bisa dikaitkan dengan tanggung jawab negara ini. Pasukan pemelihara perdamaian merupakan organ tambahan dari PBB yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB untuk memelihara, menjaga, dan membangun perdamaian disebuah konflik bersenjata.

⁵⁸ Oppenheim – Lauterpacht, *op.cit.*

Oleh karena itu dalam kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian PBB bisa dikaitkan dengan tanggung jawab negara yang bersifat tanggung jawab asli, karena dalam hal ini pasukan pemelihara perdamaian sudah jelas merupakan organ tambahan daripada Dewan Keamanan PBB yang dibuat berdasarkan pasal 29 Piagam PBB merupakan sebuah subjek hukum internasional yang dapat dimintai tanggung jawab sesuai prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya.

3. Pertanggungjawaban PBB Dalam Kasus Eksploitasi Seks Oleh Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian

3.1 Gambaran Umum Kasus Eksploitasi Seks Di Republik Afrika Tengah

Pada awalnya terdapat dugaan terhadap pasukan pemelihara perdamaian PBB yang berada di Republik Africa Tengah (MINUSCA) melakukan tindakan eksploitasi seks terhadap warga sipil yaitu anak-anak. Insiden eksploitasi seks ini terjadi pada bulan Desember 2013 dan Juni 2014. Pertama diketahui pada saat staf UNICEF lokal bersama staf kantor hak asasi manusia (*Human Rights Officer*) yang bekerja untuk misi PBB di Republik Afrika Tengah yang berada disana melakukan wawancara terhadap beberapa anak di wilayah tersebut.

Pada musim semi 2014 terungkap bahwa pasukan pemelihara perdamaian yang bertugas disana dilaporkan telah melakukan eksploitasi seks terhadap sejumlah anak-anak dalam pertukaran untuk makanan atau uang. Pelaku diduga sebagian besar dari kekuatan militer Perancis yang dikenal sebagai Angkatan Sengaris yang beroperasi sebagai pasukan

pemelihara perdamaian PBB. Pasukan ini diduga melakukan eksploitasi seks terhadap anak laki-laki di *camp* M'Poko untuk pengungsi internal di kota Bangui pada Desember 2013 sampai Juni 2014. Sebagai gantinya anak-anak menerima sejumlah makanan atau uang tunai dari para prajurit.

Dalam beberapa kasus anak-anak melaporkan informasi rinci mengenai si pelaku, termasuk nama-nama dan ciri khas tertentu seperti tato dan figur wajah. Dugaan pertama kali masuk ketika kepala sebuah LSM lokal yang bekerja di *camp* M'Poko menemukan bahwa anak pengungsi dilecehkan dengan imbalan makanan atau uang. Pada saat tuduhan dilaporkan bulan Mei 2014 kepada hak asasi manusia dan seksi keadilan dari MINUSCA ke kantor UNICEF di Bangui, dengan cepat memulai penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Pada bulan Mei dan Juni 2014, *Human Rights Officer* melakukan wawancara bersama-sama dengan petugas keamanan UNICEF, enam anak melaporkan pelecehan seksual oleh Angkatan Sengaris dan pasukan *Troop Contributing Countries* lainnya.

Tidak hanya anak laki-laki saja yang terkena pelecehan seksual oleh pasukan pemelihara perdamaian, tetapi anak perempuan dan wanita pun juga. Pada tahun 2017 tercatat 3 kasus eksploitasi seks dan 9 kasus lainnya dilaporkan pada tahun 2016 yang dilakukan pasukan pemelihara perdamaian asal Republik Demokratik Kongo. PBB langsung bereaksi keras dan pemerintah Republik Demokratik Kongo pun memutuskan menarik 630 pasukannya yang tergabung dalam misi MINUSCA.⁵⁹ Pada laporan PBB menunjukkan sedikitnya ada 106 orang wanita mengaku pernah mendapat

⁵⁹ Merdeka, **Kasus Pemerkosaan dan Eksploitasi Seks, Kongo Tarik Pasukan dari PBB**, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pemerkosaan-eksploitasi-seks-kongo-tarik-pasukan-dari-pbb.html>. diakses 10 Agustus 2018

kekerasan seksual dari pasukan pemelihara perdamaian PBB dengan imbalan makanan atau uang sebesar 1 US Dollar.

3.2 Tanggung Jawab PBB Sebagai Organisasi Internasional

Sebelumnya perlu dijelaskan apa itu organisasi internasional, sebenarnya mengenai definisi dari organisasi internasional sendiri belum terdapat kesepakatan yang jelas.⁶⁰ Namun pada umumnya organisasi internasional adalah kolektifitas dari entitas-entitas yang independent, kerjasama yang terorganisasi, dan merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Secara sederhana adapula yang mendefinisikannya sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara dua anggota negara merdeka atau lebih yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama anggotanya.

Secara sederhana organisasi internasional pengertiannya mencakup unsur-unsur keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan secara berkala, adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional, kerja sama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama dan struktur organisasi yang jelas, serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Menurut Leroy Bennet, Organisasi internasional juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶¹

- a. Organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan;

⁶⁰ Henry G. Schermers, *International Institutional Law*, The Netherlands, Rockville, Maryland, USA: Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980, hal. 5

⁶¹ Leroy Bennet, *International Organization*, New Jersey, Prentice-Hall, Inc. 1979, Hal. 3

- b. Keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat;
- c. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional;
- d. Badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas;
- e. Sekretariat tetap untuk melanjutkan administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

Dalam kasus yang diangkat penulis yaitu kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian, sudah bisa dipastikan bahwa PBB sebagai organisasi internasional dapat bertanggungjawab atas segala *wrongful act* yang dilakukan oleh anggotanya dalam melaksanakan seluruh tugasnya (*official function/official duties*).⁶² Sebagaimana yang dikatakan oleh Hans Corell, mantan penasihat hukum PBB:

“an act of a peacekeeping force is, in principle, imputable to the Organization, and if committed in violation of an international obligation entails the international responsibility of the Organization and its liability in compensation.”

Hal ini didasari oleh status operasi perdamaian sebagai organ tambahan PBB. Dan dengan demikian akan menjadi tanggung jawab PBB dan status PBB sebagai subjek hukum internasional sudah tidak diragukan lagi.

Tindakan eksploitasi seksual bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia. Tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran hukum, mandat, regulasi, kode etik PBB dan juga Buletin Sekretaris Jendral tentang *Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse*.

⁶² Zwanenburg, *Accountability of Peace Support Operations*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2005, Hal. 103

Pada kasus eksploitasi seks yang terjadi di afrika tengah beberapa oknum pasukan pemelihara perdamaian melakukan eksploitasi seks kepada warga disekitaran *camp* mereka sebagai imbalan terhadap bantuan makanan dan uang itu merupakan salah satu *wrongful act* dan dapat dimintai pertanggungjawaban, korban dapat meminta pertanggungjawaban kepada PBB sebagai organisasi internasional yang membawahi pasukan pemelihara perdamaian tersebut.

Dalam permintaan tanggung jawab kepada PBB, korban dalam kasus ini bisa diajukan kepada Dewan Keamanan PBB selaku induk dari kegiatan pemeliharaan perdamaian tersebut. Namun tidak bisa langsung diproses pada suatu sistem peradilan tertentu karena sampai saat ini belum ada sistem peradilan yang memeriksa perkara atau sengketa yang berkaitan dengan tindakan organisasi internasional yang merugikan. Saat ini peradilan yang umum digunakan adalah ICJ yaitu untuk memeriksa perkara yang subjeknya adalah negara, bukan organisasi internasional, dan ICC yang memeriksa perkara atau sengketa pidana internasional yang subjeknya adalah individu.

Pada tahun 2016 Dewan Keamanan PBB membuat *Resolution Addressing Sexual Exploitation and Abuse in Peace Operation (No. 2272)*, resolusi ini dibuat Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi banyaknya laporan tentang eksploitasi seks yang terjadi didalam sebuah operasi perdamaian, dan diharapkan resolusi ini bisa diterapkan secara efektif oleh PBB untuk mencegah terjadinya tindakan eksploitasi seks dalam operasi perdamaian.

Resolusi ini bertujuan memerangi eksploitasi dan kekerasan seks untuk kemitraan yang kuat antara PBB dengan negara anggota.⁶³ Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mendukung penuh tindakan dan menegaskan kembali dukungannya untuk menerapkan kebijakan “*zero tolerance*” terhadap eksploitasi dan kekerasan seks, dan menegaskan kembali bahwa semua warga sipil, militer, dan polisi anggota pasukan perdamaian diberlakukan standar perilaku yang sama untuk melestarikan citra, kredibilitas, dan menanamkan integritas PBB

Dalam resolusi ini PBB memutuskan Sekretaris Jendral untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti atas kasus eksploitasi seks sebelum penyelidikan dilakukan. Resolusi ini telah diadopsi untuk segera dilaksanakan sesuai isi yang tercantum kedepannya. Dalam resolusi ini PBB memiliki kewajiban untuk merepatriasi unit militer tertentu ketika ada bukti yang kredibel mengenai eksploitasi seks dan pelecehan seksual yang dilakukan unit tersebut.⁶⁴ Namun sebelumnya Sekretaris Jendral meminta negara pengirim yang personelnya menjadi subjek tuduhan eksploitasi seks untuk melakukan tindakan atau langkah yang tepat untuk menyelidiki tuduhan tersebut sesuai dengan kewenangan eksklusif untuk mendisiplinkan dan memelihara kedisiplinan tingkah laku pasukannya. Tidak hanya meminta negara pengirim untuk menyelidiki tapi juga menilai apakah negara pengirim telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk

⁶³ Laporan Sekretaris Jendral kepada Majelis Umum, **Memerangi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual**. A/71/97, Juni 2016, hlm. 4.

⁶⁴ *United Nations, Security Council Resolution No. 2272*, para 11

menyelidiki, bertanggungjawab dan memberitahukan atau melaporkan tentang kemajuan penyelidikannya kepada Sekretaris Jendral.⁶⁵

PBB juga memastikan untuk segera adanya tindakan pencegahan termasuk penilaian resiko dan eksploitasi seksual di masa mendatang. Dan juga membantu korban eksploitasi seks, termasuk dengan menjaga kerahasiaan, membantu meminimalkan trauma dan memfasilitasi tempat untuk perawatan darurat, dukungan medis, dan psikologis. Sekretaris Jendral juga diminta untuk memperluas pemeriksaannya terhadap semua personel pasukan pemelihara perdamaian untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki riwayat pelecehan seksual dan menegaskan kembali dukungannya terhadap kebijakan hak asasi manusia.⁶⁶

Tidak sampai disitu, PBB meminta kepada negara pengirim untuk memperkuat atau memperketat pelatihan tentang eksploitasi dan pelecehan seks sebelum negara pengirim mengirimkan anggota pasukan dan polisinya sesuai dengan *MoU* dan perjanjian lainnya dengan PBB, dan menerima keputusan Sekretaris Jendral untuk mewajibkan adanya *certificate of compliance*. dengan harapan bahwa dengan pelatihan dan *certificate of compliance* tersebut tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di masa depan.

Dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab organisasi internasional dan peradilan yang dapat mengadili organisasi internasional, maka dapat digunakan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas lingkupnya lebih luas dari prinsip tanggung jawab (*responsibility* dan *liability*). ILA (*International Law*

⁶⁵*Ibid*, para 13

⁶⁶*Ibid*, para 14

Association) menjelaskan bahwa teori akuntabilitas merupakan fenomena yang memiliki macam-macam bentuk. Dimana bentuk akuntabilitas yang muncul akan ditentukan oleh keadaan tertentu mengenai tindakan atau kelalaian dari organisasi internasional yang bersangkutan, negara anggota atau pihak lain yang ikut terlibat. Bentuk tersebut bisa berupa hukum, politik, administratif atau dalam segi ekonomi. Sebuah penggabungan dari empat bentuk tersebut memberikan peluang terbaik untuk mencapai tingkat pertanggungjawaban yang dibutuhkan.⁶⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum internasional dapat dikenakan tanggung jawab atas segala *wrongful act* yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian dalam hal ini eksploitasi seks. Melalui prinsip akuntabilitas, PBB dapat dikenakan pertanggungjawaban seperti a) permintaan maaf secara publik, b) kompensasi kepada para korban atas *wrongful act* tersebut, serta c) pemulihan jika ada kerusakan yang timbul atas *wrongful act* tersebut.

Pertanggungjawaban tersebut juga sesuai dengan apa yang ada di *Draft Articles on the Responsibility of International Organization* (DARIO) yang isinya sebagai berikut:

- a) Pengakuan terhadap adanya pelanggaran, penyesalan, permintaan maaf secara resmi, tanpa adanya unsur penghinaan terhadap pihak yang bertanggung jawab.⁶⁸

⁶⁷ILA (*Committee on Accountability Of International Organizations*), *final report, Berlin Conference (2004)*.

⁶⁸DARIO, pasal 37

- b) Ganti rugi atas segala kerusakan yang terjadi termasuk kerugian atas keuntungan yang hilang yang dapat dinilai secara finansial.⁶⁹
- c) Tindakan pemulihan yaitu untuk membangun ulang situasi sebagaimana situasi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.⁷⁰

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, pertanggungjawaban yang sesuai dilakukan oleh PBB atas eksploitasi seks oleh pasukan pemelihara perdamaian di Republik Afrika Tengah adalah yang pertama yaitu melakukan permintaan maaf secara publik dimana PBB harus mengakui kesalahan organnya dalam hal ini pasukan pemelihara perdamaian yang sudah melakukan tindakan eksploitasi seks kepada warga sipil dan meminta maaf secara resmi kepada para korban eksploitasi seks tersebut. Kedua melakukan ganti rugi atau kompensasi kepada korban eksploitasi seks. Ganti rugi tersebut bisa berupa santunan berbentuk uang yang diberikan kepada korban untuk mengobati luka-luka yang dideranya maupun untuk membiayai anak hasil eksploitasi seks tersebut. Ketiga memberikan bantuan berupa fasilitas untuk perawatan darurat, dukungan medis dan juga psikologis untuk para korban eksploitasi seks dalam rangka pemulihan atas kerusakan yang timbul dari kegiatan eksploitasi seks tersebut.

⁶⁹DARIO, pasal 36

⁷⁰DARIO, pasal 35

B. Sanksi Yang Bisa Diberikan Kepada Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian Atas Kasus Eksploitasi Seks

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa PBB bertanggungjawab atas segala *wrongful act* yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian dalam melaksanakan tugas resminya (*official duties*).⁷¹ Hal ini didasari status pasukan pemelihara perdamaian yang tergabung dalam sebuah operasi perdamaian merupakan organ tambahan dari PBB, dan dengan demikian akan menjadi tanggungjawab PBB. Namun hal ini tidak adil jika hanya PBB yang harus bertanggungjawab. Karena tindakan eksploitasi seks yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian bukan bagian dari tugas resminya. Oleh karena itu pasukan pemelihara perdamaian harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

1. Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB

Sebelum masuk kepada sanksi-sanksi apa yang dapat diberikan kepada pasukan pemelihara perdamaian, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasukan pemelihara perdamaian (*peacekeeping force*). Menurut mantan *Under-Secretary General for Peacekeeping Operation*, Marrack Goulding, pasukan pemelihara perdamaian diartikan sebagai operasi lapangan yang dibuat oleh PBB dengan persetujuan dari para pihak yang terkait untuk membantu mengawasi dan meredakan konflik di antara para pihak, dibawah kontrol dan perintah PBB, dibiayai oleh negara anggota PBB, dan dengan anggota serta

⁷¹ Zwanenburg, *Op.Cit*, hal. 103

peralatan yang diberikan secara sukarela oleh negara anggota PBB, bertindak secara netral dan menggunakan senjata seminimal mungkin.⁷²

Pasukan pemelihara perdamaian dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 29 Piagam PBB yang mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat membentuk organ-organ tambahan yang dirasa perlu untuk menjalankan fungsinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian biasa disebut dengan operasi perdamaian.

1.1. Dasar Hukum Pembentukan Operasi Perdamaian

Didalam usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah menetapkan lima prinsip dalam piagamnya, yaitu:⁷³

- a. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat (3));
- b. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat (4));
- c. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39);
- d. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26);
- e. Prinsip umum mengenai kerjasama dibidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat (1)).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka PBB membentuk suatu mekanisme dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia melalui suatu operasi perdamaian. Sebagai mekanisme PBB, operasi perdamaian memiliki status sebagai organ tambahan PBB, dan para

⁷² M. Goulding, *The Evolution of UN Peacekeeping, International Affairs*, Hlm. 464

⁷³ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, Jakarta, UI Press, 1987, hal 8-9

anggotanya dianggap sebagai anggota dari sebuah pasukan internasional. Operasi perdamaian yang dibentuk oleh Majelis Umum merupakan organ tambahan yang dimaksud dalam pasal 22 Piagam PBB, sedangkan operasi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan mengikuti pasal 29 Piagam PBB. *Legal personality* dari operasi perdamaian ini mengikuti *legal personality* PBB.⁷⁴

1.2. Kewenangan Membentuk Operasi Perdamaian

Mengingat bahwa tujuan utama pembentukan suatu operasi perdamaian adalah untuk mengembalikan serta memelihara perdamaian dan keamanan dunia maka kewenangan untuk membentuknya pun ada pada Dewan Keamanan sebagai badan yang memiliki tanggung jawab utama mengenai perdamaian dan keamanan dunia. Akan tetapi, pada praktiknya Majelis Umum pun dapat memiliki kewenangan tersebut.

a) Kewenangan Dewan Keamanan PBB

Berdasarkan Piagam PBB, fungsi dan kewenangan Dewan Keamanan PBB mencakup:

- 1) Menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB (Pasal 24);
- 2) Menentukan apakah suatu konflik atau suatu situasi apapun dapat menyebabkan timbulnya konflik internasional dan apabila berkepanjangan dapat membahayakan perdamaian internasional (Pasal 34);

⁷⁴ Zwanenburg, *Accountability of Peace Support Operations*, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher, 2005, hal. 37

- 3) Memberikan rekomendasi mengenai metode-metode penyelesaian konflik atau ketentuan-ketentuan penyelesaian dengan jalan damai (Pasal 36, 37, 38);
- 4) Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan yang termasuk dalam agresi dan memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil (Pasal 37);
- 5) Menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain tanpa menggunakan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi (Pasal 41);
- 6) Mengambil tindakan militer yang diperlukan untuk dilakukan terhadap tindakan yang dianggap sebagai agresi (Pasal 42) serta mengundang negara-negara anggota untuk berpartisipasi dalam tindakan militer tersebut dan mengirimkan kontingennya untuk bergabung dalam pasukan gabungan PBB (Pasal 44);
- 7) Memberikan rekomendasi untuk diterimanya suatu negara sebagai anggota baru PBB (Pasal 4 ayat (2)) dan menentukan jangka waktu di mana negara bisa menjadi pihak dari suatu konflik yang diajukan kepada Mahkamah Internasional (Pasal 36 ayat (3) dan 93 ayat (2));
- 8) Melaksanakan fungsi-fungsi perwalian dari wilayah-wilayah strategis PBB (Pasal 52, 53, dan 54);
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum tentang pengangkatan Sekretaris Jendral (Pasal 97).

Dari berbagai fungsi dan kewenangan Dewan Keamanan diatas, terlihat bahwa pembentukan operasi perdamaian PBB merupakan bagian

dari kewenangan Dewan Keamanan sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menentukan apakah suatu konflik atau suatu situasi apapun dapat menyebabkan timbulnya konflik internasional dan apabila berkepanjangan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, serta kemudian merekomendasikan tindakan apa yang harus diambil sebagai penyelesaiannya, termasuk tindakan secara damai maupun yang memiliki sifat memaksa. Kedua hal tersebut merupakan perwujudan dari pasal 32 dan pasal 37. Sementara itu untuk pembentukan operasi perdamaian dilingkup tindak pemaksaan, maka dengan didasari pasal 42 dan 44, Dewan Keamanan telah diberikan kewenangan untuk mengundang negara-negara anggota untuk berpartisipasi dalam tindakan militer tersebut dan mengirimkan kontingennya untuk bergabung dengan pasukan gabungan. Dengan adanya pasal tersebut, maka keberadaan operasi perdamaian berada dibawah wewenang Dewan Keamanan.

b) Kewenangan Majelis Umum PBB

Telah disebutkan bahwa Dewan Keamanannya yang memiliki wewenang untuk membentuk suatu operasi perdamaian. Namun, praktik dalam PBB menunjukkan lain. Ternyata Majelis Umum pun dapat membentuk operasi perdamaian, namun hanya dalam keadaan tertentu. Keadaan tersebut adalah jika para anggota tetap dari Dewan Keamanan tidak mencapai kesepakatan dalam mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan yang menyangkut pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, maka Majelis Umum dapat mengambil keputusan dalam sidang darurat yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam dari permohonan

persidangan darurat. Praktik ini dikenal dengan *Uniting for Peace Resolution*. *Uniting for Peace Resolution* yang pertama kali dilakukan oleh Majelis Umum pada kasus pengiriman tentara ke Korea pada tahun 1950 melalui Resolusi Majelis Umum No. 337. Hal ini dilakukan setelah Rusia dan China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan mengancam akan memveto Resolusi pengiriman operasi perdamaian ke Korea. Majelis Umum kemudian memutuskan untuk membentuk operasi perdamaian untuk Korea dan mengirim pasukan perdamaian ke daerah konflik tersebut. Adanya mekanisme otoritas Majelis Umum ini adalah cara untuk menjawab jalan keluar dalam sistem PBB di mana penggunaan hak veto dapat menghentikan usaha pemelihara perdamaian dan keamanan dunia dan telah dilakukan dalam berbagai operasi perdamaian misalnya di Kongo, Mesir, Palestina, Afghanistan dan lain-lain.

1.3. Kewenangan Untuk Melaksanakan Operasi Perdamaian

Kewenangan untuk membentuk dan menyusun suatu pasukan pemelihara perdamaian kemudian didelegasikan dari Dewan Keamanan kepada Sekretaris Jendral yang juga akan mengarahkannya.⁷⁵ Meskipun pada awalnya Sekretaris Jendral tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan dunia, namun dengan adanya perkembangan situasi hubungan internasional, maka wewenang untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang telah dibebankan kepada Dewan Keamanan itu telah mengakibatkan perkembangan lain yang terletak dibidang pelaksanaan dan

⁷⁵ United Nations, *Basic Facts*, hal. 74.

operasionalnya.⁷⁶ Sementara itu, perencanaan dan pengurusannya dibantu oleh *Department of Peacekeeping Operations* (DPKO) dan *Department of Field Support* (DFS).⁷⁷

1.4. Pembentukan Operasi Perdamaian

Tahapan pembentukan operasi perdamaian adalah hak dari Dewan Keamanan PBB sebagai badan yang memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia untuk menentukan kapan dan di mana suatu operasi perdamaian PBB akan ditempatkan. Dewan Keamanan memberikan respon pada suatu krisis berdasarkan analisa kasus per kasus dan kemudian mempertimbangkan berbagai pilihan tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal menentukan pembentukan suatu operasi perdamaian, hal-hal dibawah inilah yang biasanya dijadikan pertimbangan:⁷⁸

- a. Apakah suatu keadaan telah menjadi atau akan berlanjut menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia;
- b. Apakah terdapat suatu kesepakatan gencatan senjata dan apakah para pihak telah berkomitmen untuk melakukan suatu proses perdamaian yang ditujukan untuk mencapai suatu kesepakatan politik yang lebih lanjut;
- c. Apakah terdapat suatu tujuan politik yang jelas dan apakah tujuan tersebut dapat direfleksikan dalam suatu mandat;

⁷⁶ Syahmin A.K, **Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional**, Bandung, Bina Cipta, 1986, hal 37

⁷⁷ United Nations, *United Nations Peacekeeping: Principles and Guidelines*, hal. 8.

⁷⁸ United Nations Security Council, *Statment by the President of the Council of 3 May 1994*, S/PRST/1994/22.

- d. Apakah suatu mandat yang spesifik untuk operasi perdamaian tersebut dapat disusun;
- e. Apakah terdapat cukup jaminan (*reasonable guarantees*) terhadap keselamatan keamanan personel PBB yang akan dikirimkan.

Pasukan gabungan ini juga hanya dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai langkah terakhir, setelah upaya penyelesaian konflik secara damai telah gagal dilaksanakan dan konflik tetap berlangsung. Langkah awal bagi pembentukan tersebut dapat berasal dari permintaan para pihak yang berkonflik, laporan Sekretaris Jendral berdasarkan pasal 99 Piagam PBB, ataupun Resolusi Dewan Keamanan yang mengancam suatu konflik berkelanjutan. Kemudian Dewan Keamanan akan mengirim Sekretaris Jendral untuk melakukan investigasi lebih lanjut tentang keadaan di daerah konflik untuk selanjutnya mempertimbangkan aktor diatas sebelum memutuskan. Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka Dewan Keamanan akan memerintahkan pembentukan suatu operasi perdamaian. Dalam Resolusinya, Dewan Keamanan akan menunjuk Sekretaris Jendral sebagai penanggungjawab operasi tersebut dan untuk segera memulai penempatan pasukan pemelihara perdamaian didaerah tersebut. Majelis Umum telah menetapkan bahwa operasi perdamaian yang termasuk *First Generation Peacekeeping* harus telah terbentuk dalam 30 hari setelah mandatnya diberikan, dan 90 hari untuk operasi dengan generasi-generasi selanjutnya.⁷⁹

⁷⁹ United Nations, *Basic Facts*, Hal. 68

Setelah disetujui, maka terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan operasi perdamaian. Pertama tahap *Pre Deployment*, meliputi negosiasi berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pembentukan operasi perdamaian, serta kunjungan ke Negara penerima dan calon Negara pengirim untuk memeriksa kesiapan. Kedua tahap *Rapid Deployment*, dalam tahap ini suatu tim akan berangkat ke Negara penerima untuk mempersiapkan premis-premis yang akan digunakan oleh pasukan pemelihara perdamaian. Ketiga tahap *Mission Start-Up* dimulai dengan perumusan sistem *command and control* untuk operasi perdamaian tersebut, serta awal mula kedatangan anggota pasukan. Tahapan selanjutnya adalah mengaktifkan seluruh bagian-bagian dari operasi perdamaian seiring dengan dikirimnya anggota pasukan pemelihara perdamaian secara lengkap.

Seperti disebutkan dalam tahap *Pre-Deployment*, dibentuklah dokumen-dokumen yang akan menjadi kerangka hukum dalam pelaksanaan suatu operasi perdamaian. Sebelum suatu pasukan pemelihara perdamaian dikirim untuk memulai misinya, Komandan Pasukan (*Force Commander*) haruslah menerima beberapa petunjuk. Untuk itu Sekretaris Jendral membuat suatu petunjuk (*Directive*) berdasarkan mandat yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan yang berisikan berbagai instruksi bagi komandan pasukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Sementara itu, suatu *Status of Force Agreement* (SOFA) haruslah dinegosiasikan dengan Negara penerima yang nantinya akan diberikan suatu kepastian bagi pasukan pemelihara perdamaian untuk melaksanakan misinya di daerah

tersebut tanpa intervensi dari luar.⁸⁰ Sekretaris Jendral juga harus menegosiasikan perjanjian dengan calon Negara pengirim yang akan meminjamkan kontingen militernya sebagai bagian dari pasukan pemelihara perdamaian. Dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum untuk pembentukan pasukan pemelihara perdamaian PBB biasanya terdiri dari:⁸¹

- a. Resolusi Dewan Keamanan atau Majelis Umum;
- b. *Status of Forces Agreement* antara PBB dan Negara penerima;
- c. Persetujuan antara setiap Negara pengirim dan PBB;
- d. Peraturan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral untuk pasukan pemelihara perdamaian tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh bagian lain dari Sekretariat PBB.

1.5. Struktur Keanggotaan Operasi Perdamaian

Dalam pasukan pemelihara perdamaian terdapat dua komponen, yakni anggota yang berasal dari warga sipil tersebut, dan anggota militer. Adapun anggota yang berasal dari warga sipil tersebut meliputi Staf PBB, sukarelawan, serta pengamat militer dan polisi sipil dimana semuanya langsung dipekerjakan oleh PBB. Sementara komponen militer berasal dari kontinge-kontingen militer Negara pengirim yang berkontribusi personel militernya dalam rangka mensukseskan operasi perdamaian tersebut.

Kedua komponen dari pasukan pemelihara perdamaian ini bekerjasama untuk memenuhi mandat yang diberikan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa mereka tunduk pada rezim hukum yang berbeda, di mana anggota

⁸⁰ Ray Murphy, *UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia, and Kosova: Operational and Legal Issues in Practice*, New York, Cambridge University Press, 2007, hlm. 108

⁸¹ *Ibid*

kontingen militer masih akan terikat dengan hukum yang mengikat negaranya.

a. Staf PBB (*UN Officials*)

Dalam menjalankan operasi perdamaian, PBB membutuhkan staf yang akan menangani berbagai masalah administratif dan berhubungan dengan warga sipil. Pasal 97 Piagam PBB menyatakan bahwa PBB memiliki staff yang termasuk dalam ranah kegiatan Sekretariat PBB. Sedangkan pasal 101 menyatakan bahwa Sekretaris Jendral dapat menunjuk anggota staf PBB yang berkewajiban untuk memiliki standar integritas yang tinggi. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka direkrutlah berbagai staf yang berkontrak langsung dengan PBB melalui Sekretariat. Staf PBB ini akan terikat dengan *UN Staff Rules and Regulations* yang diinkorporasikan dengan perjanjian kerjanya. Staf PBB yang bekerja dalam operasi perdamaian memiliki imunitas sesuai yang diatur dalam *Convention on the Privileges and Immunity of the United Nations* tahun 1946, termasuk imunitas dari proses hukum yang menyangkut tindakan dan kata-katanya selama melakukan fungsi jabatannya meskipun ia telah tidak menjabat lagi.

b. *Experts on Mission: UN Civilian Police and UN Military Observers*

Observer dan polisi sipil ini merupakan warga dari beberapa Negara, akan tetapi mereka bukan bagian dari kontingen militer. Observer dan polisi sipil tersebut dianggap sebagai *expert on mission* seperti disebutkan oleh pasal 6 Konvensi Imunitas PBB. Hal ini berarti bahwa mereka juga mendapat imunitas dan hak istimewa seperti yang diatur dalam Konvensi

Imunitas tersebut. Namun imunitasnya dapat dicabut oleh Sekretaris Jendral.

Expert on Mission dipekerjakan secara pribadi oleh PBB tanpa memerlukan pengaturan khusus dari Negara asalnya.⁸² *Expert on Mission* ini tetap memelihara identitas kenasionalan mereka dan tidak memiliki status sebagai staf Sekretariat PBB.⁸³ Adapun pengaturan mengenai perilaku anggota *Expert on Mission* selama operasi perdamaian terdapat dalam Buletin Sekretaris Jendral mengenai *Regulations Governing the Status, Basic Rights and Duties of Officials other than Secretariat Officials, and Expert on Mission*. Poin 2 (j) dari buletin tersebut menyebutkan bahwa “*expert on mission must comply with local laws and honour their private legal obligations, including, but not limited to, the obligation to honour orders of competent courts.*”

c. *UN Volunteer*

UN Volunteer merupakan *partner* PBB dalam melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dan disalurkan melalui *The UN Development Programme* (UNDP). Sukarelawan PBB ini tidak terikat dengan perjanjian kepegawaian PBB, sehingga ia tidak tunduk pada *UN Staff Rules and Regulations*. Perilaku mereka diatur oleh dokumen terpisah yang pada dasarnya mencakup prinsip-prinsip yang sama dengan apa yang diharapkan dari staf PBB, yakni di dalam *the UN Volunteer Conditions of Service and Rules of Conduct*. *UN Volunteer* mendapat imunitas dan hak istimewa seperti halnya staf PBB. Hal ini diatur dalam Model SOFA sebagai bentuk

⁸² M. Bothe, ‘*Peace-keeping*’ dalam B. Simma, *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2002, hlm. 687

⁸³ *Ibid*

persetujuan Negara penerima untuk memberikan imunitas dan hak istimewa pada *UN Volunteer* berdasarkan Konvensi Hak Istimewa dan Imunitas PBB.

d. *Military Members of National Contingents*

Keberadaan anggota militer yang merupakan organ negara tertentu didalam pasukan pemelihara perdamaian PBB membawa kompleksitas tersendiri. Hal ini mengingat sangat besarnya berkaitan para anggota kontingen tersebut dengan Negaranya. Keterikatan ini diantaranta meliputi kontingen militernya. Hal ini berkaitan dengan premis bahwa sebagai bagian dari organ negara, maka para anggota kontingen militer ini akan tunduk pada kewajiban hukum yang mengikat negaranya, dan dengan demikian, segala tindakannya akan dinilai oleh Negaranya.

Dalam *Directives for Disciplinary Matters Involving Military Members of National Contingents*, telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan anggota kontingen militer ini.⁸⁴ Poin 5 mengatur bahwa anggota dari kontingen militer nasional tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan karakter ketidakberpihakan dan independensi PBB. Mereka juga dilarang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan esensi mandatnya, SOFA, hukum lokal, dan hukum lain yang berlaku diatasnya. Sedangkan poin 6 menegaskan bahwa anggota kontingen militer ini diwajibkan untuk bertingkah laku dengan integritas tertinggi selama mereka menjadi bagian dari operasi PBB.

Anggota kontingen militer diberikan imunitas dan hak-hak istimewa atas segala tindakan maupun ucapan yang dilakukan dalam kapasitas

⁸⁴ Departement of Peacekeeping Operations, Military Directives, DPKO/MD/03/00993

resminya (*official capacity*). Akan tetapi, mereka dapat dikenakan proses hukum di Negara penerima apabila hal tersebut sehubungan dengan sengketa perdata yang tidak terkait dengan kapasitas resminya. Adapun mengenai tuntutan kriminal, anggota kontingen militer ini hanya dapat diadili di bawah yurisdiksi Negara asalnya.⁸⁵

Perlu diperhatikan bahwa meskipun kedisiplinan anggota kontingen militer ini merupakan tanggung jawab Negaranya, PBB tetap memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa keadilan tetap dijalankan.⁸⁶ Oleh karena itu, PBB dapat melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh anggota kontingen militer dan jika ditemukan dasar yang kuat, PBB dapat merepatriasi anggota kontingen militer tersebut untuk menghadapi konsekuensi atas pelanggaran hukumnya. Setelah repatriasi, PBB dapat meminta laporan dari Negara pengirim mengenai tindak lanjut dari proses hukum terhadap anggota kontingen militer tersebut.

2. Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Anggota Pasukan Pemelihara Perdamaian

Dalam menentukan sanksi yang dapat diberikan kepada pasukan pemelihara perdamaian dalam kasus eksploitasi seks ini harus dilihat dulu individu yang melakukan. Dilihat dari struktur keanggotaan yang sudah dijelaskan sebelumnya apakah yang melakukan tindakan eksploitasi seks tersebut merupakan *UN Officials*, *UN Volunteer*, *Expert on Mission*, atau *Military Members of National Contingents*.

⁸⁵*Ibid*, Poin 8

⁸⁶*Ibid*, Poin 28

Didalam kasus eksploitasi seks yang terjadi di Republik Afrika Tengah ini sudah dijelaskan diatas bahwa yang melakukannya adalah beberapa pasukan militer yang dikirim dari Republik Demokratik Kongo, yang berarti ia adalah *Military Members of National Contingents*. Hal ini didasari karena sesuai penjelasan sebelumnya tentang *Military Members of National Contingents*, beberapa pasukan yang melakukan tindakan eksploitasi seks tersebut merupakan pasukan yang dikirim oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk menjadi kontingen dalam operasi perdamaian yang dijalankan oleh Dewan Keamanan PBB.

Memang dalam kasus eksploitasi seks yang dilakukan pasukan pemelihara perdamaian dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada PBB namun tidak hanya PBB yang bertanggungjawab atas kasus ini. Negara yang ikut melakukan kontribusi dalam kegiatan operasi perdamaian ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam kasus ini yang melakukan eksploitasi seks tersebut adalah pasukan militer yang diperbantukan dari negara Republik Demokratik Kongo yang merupakan *Troop Contributing Countries* (TCC). Oleh karena itu sesuai dengan *Articles on State Responsibility* negara Republik Demokratik Kongo dapat dikenakan *state liability* yang dibagi menjadi 2 yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

Status of Forces Agreement (SOFA) merupakan perjanjian antara PBB dan Negara penerima terkait pengiriman suatu pasukan pemelihara perdamaian, dan didalam perjanjian ini terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh anggota pasukan pemelihara perdamaian. Memang dalam SOFA tidak secara

spesifik menyebutkan tanggung jawab pasukan pemelihara perdamaian. Namun, terdapat beberapa pengaturan perihal mekanisme yang harus dijalankan dalam rangka menjawab pertanyaan perihal pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Pasal 47 Model SOFA mengatur perihal tindak pidana yang dilakukan oleh anggota pasukan pemelihara perdamaian dengan dua cara:

- a. Jika individu yang diduga melakukan tindak pidana adalah *civilian personnel*, maka Special Representative/Commander akan melakukan penyelidikan awal dan kemudian bersepakat dengan Negara penerima apakah proses peradilan pidana dapat dilakukan terhadapnya. Dalam hal disepakati akan dilakukan peradilan di Negara penerima, maka imunitas individu tersebut akan dicabut oleh Sekretaris Jendral sebagaimana yang telah ditentukan dalam Konvensi Imunitas PBB. Pilihan lain yang dapat disepakati adalah untuk merepatriasi individu tersebut ke Negara asalnya dan kemudian meminta Negara asal untuk melakukan proses pengadilan pidana terhadapnya.
- b. Jika individu yang diduga melakukan tindak pidana adalah *military personnel*, maka pertanggungjawaban pidananya akan dilaksanakan oleh Negara pengirim melalui suatu proses peradilan pidana

Oleh karena itu, dikarenakan dalam kasus ini yang melakukan tindak eksploitasi seks adalah *military personnel*, maka pertanggungjawaban pidananya akan dilaksanakan di negara asalnya melalui suatu proses peradilan pidana sesuai dengan hukum nasionalnya. Hal ini sesuai dengan MoU yang mengatakan bahwa Negara pengirim memiliki hak eksklusif untuk

melaksanakan yurisdiksi kriminal terhadap anggota kontingen militernya. Dengan demikian, Negara pengirim merupakan satu-satunya pihak yang dapat melaksanakan penghukuman terhadap pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh anggota kontingen militer dalam pasukan pemelihara perdamaian. Dengan adanya kewenangan eksklusif tersebut, hukum internasional memberikan kewajiban bagi Negara pengirim untuk melakukan *due diligence* dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban *due diligence* ini meliputi kewajiban untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia yang dimana tindakan eksploitasi seks ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dicantumkan di Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2272 tentang eksploitasi seks dalam operasi perdamaian.

Perihal tanggung jawab perdata, pasal 49 Model SOFA mengindikasikan adanya tanggung jawab individu terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan klaim perdata dan hal tindakan tersebut bukan termasuk tugas resminya (*official duties*). Jika hal yang demikian terjadi, maka individu tersebut dapat diproses dalam sistem peradilan di Negara penerima. Tanggung jawab perdata ini bisa berupa kompensasi atau ganti rugi yang dibebankan kepada individu yang melakukan tindakan eksploitasi seks tersebut. Kompensasi ini merupakan suatu bentuk reparasi sebagai konsekuensi tanggung jawab menurut hukum internasional dimana kompensasi ini diberikan terhadap kerugian yang bisa diukur dengan uang, baik kerugian materil ataupun moral. Kompensasi bagi kerugian moral dapat diberikan kepada korban yang mengalami tindakan eksploitasi seks atau juga untuk membiayai

anak hasil tindakan eksploitasi seks tersebut. Selain itu kompensasi ini juga bisa sebagai dukungan bagi korban untuk membangun kembali hidupnya pasca trauma yang dideranya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permintaan tanggung jawab dalam kasus ini belum dapat langsung diproses karena sampai saat ini belum adanya sistem peradilan yang memeriksa perkara terkait dengan tindakan organisasi internasional yang merugikan. PBB dapat bertanggungjawab menurut teori tanggung jawab asli dikarenakan pasukan pemelihara perdamaian merupakan organ tambahan daripada PBB, dan bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan teori akuntabilitas dan *Draft Article on the Responsibility of International Organization* yang dapat dilakukan oleh PBB ada 3 yaitu pertama melakukan permintaan maaf secara publik dimana PBB harus mengakui kesalahan organnya yang sudah melakukan tindakan eksploitasi seks kepada warga sipil dan meminta maaf secara resmi kepada para korban eksploitasi seks. Kedua, melakukan ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Ganti rugi tersebut bisa berupa santunan berbentuk uang yang diberikan kepada korban untuk mengobati luka-luka maupun untuk membiayai anak hasil eksploitasi seks. Ketiga, memberikan bantuan berupa fasilitas untuk perawatan darurat, dukungan medis dan juga psikologis dalam rangka pemulihan atas kerusakan yang timbul dari tindakan eksploitasi seks tersebut.
2. Pasukan pemelihara perdamaian yang melakukan eksploitasi seks tersebut dapat dikenakan tanggung jawab pidana dan perdata sesuai dengan perjanjian antara negara PBB dengan negara penerima dalam bentuk *Model SOFA*. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan di Negara asalnya melalui suatu

proses peradilan pidana sesuai dengan hukum nasionalnya. Kemudian pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan di Negara penerima, dan berupa ganti rugi atau kompensasi yang dibebankan kepada individu tersebut. Ganti rugi atau kompensasi tersebut kemudian diberikan kepada korban atau untuk mengobati luka yang didera atau membiayai anak hasil eksploitasi seks.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah harus dibuatnya suatu pengaturan yang secara rinci dan jelas mengenai pertanggungjawaban organisasi internasional dalam hal ini PBB atas tindakan eksploitasi seks yang dilakukan oleh organnya. Dan diharapkan dibuatnya suatu peradilan selain ICJ dan ICC yang khusus untuk memeriksa perkara terkait subjek hukum internasional bukan negara.
2. Lalu untuk sanksi yang dapat diberikan kepada pasukan pemelihara perdamaian yang terbukti melakukan tindakan eksploitasi seks tersebut, diharapkan dibuat juga suatu pengaturan secara khusus dalam menangani kasus eksploitasi seks yang terjadi dalam suatu operasi perdamaian. Dan didalamnya dijelaskan secara rinci sanksi pidana dan perdatanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Maman Suherman, **Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi**, PT. Ghalla Indonesia, Jakarta, 2003.

Abdul Wahid, Muhamad Irfan, **Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001

Amerasinghe, C.F, *Priciples of the institutional law of international organizations Second Revised Edition*, Cambridge, Cambridge University Press.

Boer Mauna. **Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global**, Bandung: PT.Alumni, 2003.

Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*

Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika 2012.

Henry G. Schermers, *International Institutional Law*, The Netherlands, Rockville, Maryland, USA: Sijthooff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980.

Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Jakarta, CV Rajawali, 1991.

J.G. Starke, *Introduction to International Law, Tenth Edition*, Butterworth, London, 1989.

J.G. Merrills. *International Dispute Settlement*, Cambridge : Cambridge U.P. 1995.

- Julio Barboza. *The Environment, Risk, and Liability in International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston, 2011.
- Leroy Bennet, *International Organization*, New Jersey, Prentice-Hall, Inc. 1979.
- Oppenheim – Lauterpacht, *International Law*, Mckay, 1965.
- Robert C.R. Siekmann. *National Contingents in United Nations Peacekeeping Forces*, Martinus Nijhoff Publishers, 1991.
- Sean D.M, *Principles of International Law*, USA, 2006.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sri Setianingsih Suwardi. **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006
- , **Pengantar Hukum Organisasi Internasional**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.
- Sugeng Istanto, **Hukum Internasional**, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Sumaryo Suryokusumo. **Organisasi Internasional**, Jakarta, UI-Press, 1978.
- Syahmin A.K, **Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional**, Bandung, Bina Cipta, 1986.
- Zwanenburg, *Accountability of Peace Support Operations*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2005.

Jurnal

Imam Mulyani. **Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian.**

M. Goulding, *The Evolution of UN Peacekeeping, International Affairs*

Marko Divac Oberg. *The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ*, Eur.J.Int'l.L, 2006.

Internet

Armada Global Inc. *Central African Republic: Conflict and Instability*.
http://www.armadaglobalinc.com/docs/Central_African_Republic_Conflict_Instability.pdf

International Crisis Group. *Central African Republic: Priorities of The Transition*.
<http://www.crisisgroup.org/~media/Files/africa/central-africa/central-africanrepublic/203-central-african-republic-priorities-of-the-transition.pdf>.

Merdeka, **Kasus Pemerkosaan dan Eksploitasi Seks, Kongo Tarik Pasukan dari PBB**,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pemerkosaan-eksploitasi-seks-kongo-tarik-pasukan-dari-pbb.html>.

Global Security. *Central African Republic-Francois Bozize*.
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/car-3.html>

United Nations Peacekeeping, *Peacekeeping Operations: Current Operations*,
<https://peacekeeping.un.org/en>.

Tirto, **Jejak Suram Kejahatan Seksual Pasukan Penjaga Perdamaian**,
<https://tirto.id/jejak-suram-kejahatan-seksual-pasukan-penjaga-perdamaian-ctX8>.

Dokumen

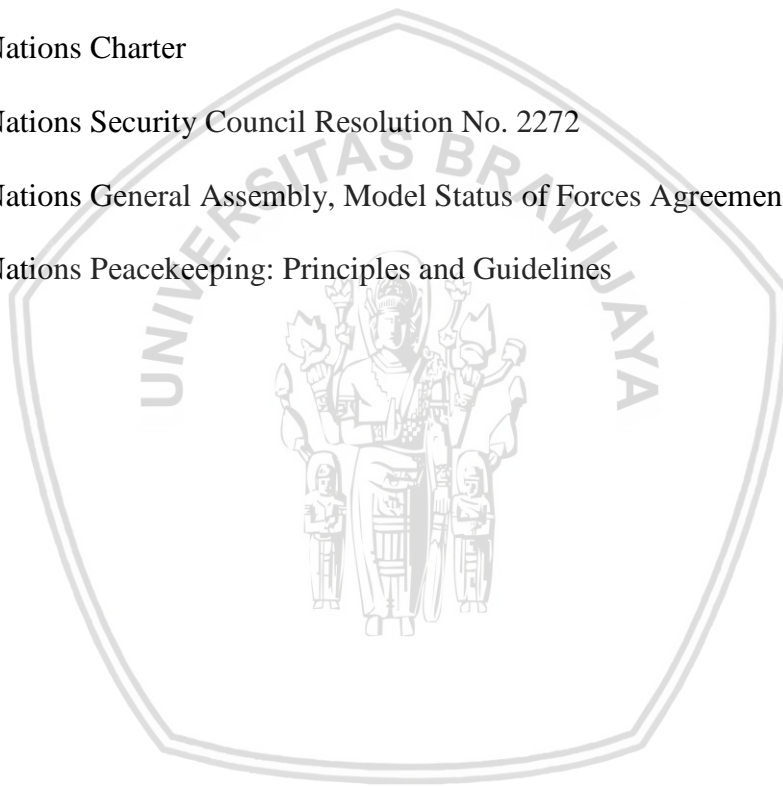
International Law Commission Draft Articles on the Responsibility of
International Organization 2011

United Nations Charter

United Nations Security Council Resolution No. 2272

United Nations General Assembly, Model Status of Forces Agreement

United Nations Peacekeeping: Principles and Guidelines





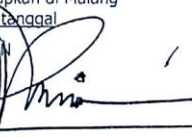
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 748 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : Dr. Setyo Widagdo, SH.M.Hum.; Dony Aditya Prasetyo, SH.MH., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Demy Sandia Ridwan NIM 135010100111127
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal

RAHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 818/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : DEMY SANDIA RIDWAN
NIM : 135010100111127
Judul : TANGGUNG JAWAB PBB DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKS OLEH
PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN DI KONFLIK BERSENJATA
REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 September 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Denny Sandia Ridwan
No. Induk : 135010100111127
Judul Skripsi : Tanggung Jawab P28 dalam
Isuasi Eksplorasi Sains oleh
Pasukan Peneliti dari Pemerintah
& World Bank dalam Rangka

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Setyo Widayanto, SH, N.Hum
Nama Dosen Pendamping : Denny Ridwan Ridwan, SH, MH
SK. Dekan : No. 748
Tgl.

Bimbingan mulai :
Bimbingan selesai :

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
25 April 2018	Revisi Bab 1-3 (sudah selesai)	Revisi bab 1 dan 2	
18 Mei 2018	Langit Bab 4	Revisi Bab 4	
3 Agustus 2018	Revisi Bab 4	Revisi Bab 4	
8 Agustus 2018		Revisi Bab 4	
31 Agustus 2018	Revisi Bab 4	Revisi Bab 4	
70 September 2018	Revisi Bab 5	Revisi Bab 5	
23 September 2018	Revisi Bab 5	Revisi Bab 5	

Mengetahui
Ketua Bagian

Dosen Pembimbing Pendamping

Malang, 28-09-2018
Dosen Pembimbing Utama

Setyo Widayanto